



BUPATI SAMBAS

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 28 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Perpres Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019. Target di akhir RPJMN 2019 adalah tersedianya *universal access* atau cakupan akses sebesar 100% (seratus persen) untuk air minum dan juga sanitasi sebagai upaya pengamanan air minum dan Perumusan kebijakan penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 juga mempertimbangkan dan memperhatikan pencapaian tujuan serta sasaran pembangunan milenium (*Millenium Development Goals/MDG's*) dalam tahun 2015;

2. bahwa untuk mendukung maksud pada huruf a, tersebut diatas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Sambas 2015-2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 111

Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820).

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kab. Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 724);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 9);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas 2012 – 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN TAHUN 2015-2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RAD AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian Target di akhir RPJMN 2019 adalah tersedianya *universal access* atau cakupan akses sebesar 100% untuk air minum dan juga sanitasi.
3. Sumber air adalah yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air leding, keran umum,

sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan.

4. Sumber air minum tak layak adalah sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase.
5. Fasilitas sanitasi yang layak adalah sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia.
6. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
7. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah, dan lembaga swasta.
8. Indikator sasaran RPJMN 2015-2019 Bidang Infrastruktur di bidang air minum adalah tercapainya 100% (seratus persen) pelayanan air minum yakni 85% (delapan puluh lima persen) penduduk terlayani akses sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan 15% (lima belas persen) sesuai kebutuhan dasar (*basic needs*).
9. Indikator sasaran RPJMN 2015-2019 Bidang Infrastruktur di bidang sanitasi adalah tercapainya 100% (seratus persen) pelayanan sanitasi (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) yakni 85% (delapan puluh lima persen) penduduk terlayani akses sesuai Standart Pelayanan Minimal (SPM) dan 15% (lima belas persen) sesuai kebutuhan dasar (*basic needs*).
10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

11. Indikator SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 (enam puluh) liter/orang/hari.
12. Indikator SPM bidang sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dengan target SPM 60% (enam puluh persen), dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota dengan target SPM 5% (lima persen).
13. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
14. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
15. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang, dan menentukan tujuan pembangunan.
16. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
17. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
18. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan

(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

20. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindari kesimpangsiuran dan duplikasi.
21. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
22. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.
23. Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Kesehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RAD AMKL adalah Rencana Daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan kesehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) Tahun.
24. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PAMSIMAS adalah kegiatan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang dananya berasal dari kontribusi masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat dan Bank Dunia.
25. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas.
27. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas.

BAB II

PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

RAD-AMPL Tahun 2015-2019 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat selama Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 dalam rangka mendorong pembangunan infrastruktur dasar air minum dan sanitasi guna mendukung percepatan pencapaian *universal access*.

Pasal 3

RAD-AMPL Kabupaten Sambas 2015-2019 berfungsi sebagai :

- a. Instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi daerah jangka menengah;
- b. Rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan;
- c. Media internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL; dan
- d. Acuan pengalokasian anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL;

Pasal 4

RAD-AMPL Tahun 2015-2019 disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Sambas untuk mendukung percepatan pencapaian **90,30 %** (Sembilan puluh koma tiga puluh persen) pelayanan air minum aman dan **91,45 %** (Sembilan Puluh satu koma empat puluh lima persen) pelayanan sanitasi layak menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja SKPD, dan APBD Kabupaten Sambas sampai dengan Tahun 2019.

BAB III

PELAKSANAAN 2015-2019

Pasal 5

Pelaksanaan RAD AMPL Tahun 2015-2019 adalah melalui RKPD, Renja SKPD, APBD Kabupaten Sambas, serta dapat melalui integrasi RAD AMPL Kabupaten Sambas ke dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL Tahun 2015-2019 yang bersumber dari dana di luar APBD, maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda dan SKPD teknis terkait.

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RAD AMPL Tahun 2015-2019 dapat yang bersumber dari pendanaan diluar APBD dan APBN, tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah dan pihak penyandang dana.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan RAD AMPL Tahun 2015-2019 tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir Tahun 2019, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja SKPD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan paling sedikit 2 (dua)

- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.

Pasal 10

Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD kabupaten/kota melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD-AMPL yang menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing.
- (2) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan hasil, Kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

Pasal 12

Kepala SKPD melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

Pasal 13

- (1) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan kesehatan lingkungan daerah.
- (2) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

- (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Teknis Penyusun RAD AMPL.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.

- (3) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappeda.
- (4) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dokumen RAD AMPL Kabupaten Sambas 2015-2019 sebagaimana lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Sambas ini.

Pasal 16

Peraturan Bupati Sambas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
Pada tanggal 4 Agustus 2015

BUPATI SAMBAS,

TTD
JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 4 Agustus 2015


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

JAMIAT AKADOL

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 28

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
DAN PERUNDANG-UNDANGAN


MARIANIS
Pembina (IV/a)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Berkat dan Rahmad-Nya, penyusunan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD- AMPL) Kabupaten Sambas 2015 – 2019 bisa terselesaikan.

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sambas, melalui pemenuhan kebutuhan dasar terhadap Air Minum, tidak dapat dipisahkan dari Penyehatan Lingkungan, sehingga Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (POKJA AMPL) Kabupaten Sambas menyusun RAD-AMPL yang diharapkan dapat menjadi Pedoman dalam Pelaksanaan AMPL di Kabupaten Sambas terutama bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Masyarakat dan Stakeholder yang terkait dengan Pembangunan AMPL.

Dengan tersusunnya RAD-AMPL 2015-2019, diharapkan seluruh Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang AMPL di Kabupaten Sambas terintegrasi mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan sampai Evaluasi dan pelaporannya. Sehingga mencapai hasil secara optimal, sehingga Visi Kabupaten Sambas **“Terwujudnya Sambas yang Mandiri, Berprestasi, Madani serta Sejahtera, melalui Bela Terpikat Terigas”** tercapai.

Kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya Dokumen RAD-AMPL

Kabupaten Sambas ini diucapkan terimakasih.

Sambas, Desember 2014

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

OUTLINE DOKUMEN RAD - AMPL

Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan
- 1.4 Ruang Lingkup Rencana Aksi Daerah

BAB II KONDISI UMUM PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

- 2.1 Kondisi Saat Ini
 - 2.1.1 Air Minum
 - 2.1.2 Sanitasi
- 2.2 Permasalahan
 - 2.3.1. Air Minum
 - 2.3.2. Sanitasi
- 2.3 Tantangan
 - 2.4.1. Air Minum
 - 2.4.2. Sanitasi

BAB III ISSUE STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

- 3.1 Issue Strategis
- 3.2 Arah Kebijakan 2015 - 2019
- 3.3. Strategi Pencapaian 2015 - 2019

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

- 4.1 Program dan kegiatan bidang Air Minum 2015 - 2019
- 4.2 Program dan kegiatan bidang Sanitasi 2015 - 2019

BAB V KEBUTUHAN INVESTASI

- 5.1. Perkiraan Kebutuhan Investasi
- 5.2. Rencana Pembiayaan

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- 6.1 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi
- 6.2 Formulir Pemantauan dan Evaluasi.

BAB VII PENUTUP

Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tahun 2010 lalu, Pemerintah Indonesia menerbitkan sejumlah kebijakan yang sangat mendukung percepatan kinerja pembangunan air minum dan sanitasi, antara lain Instruksi Presiden No 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan (mencakup program Pro Rakyat, Keadilan untuk Semua, Pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No.0445/M.PPN/11/2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target *Millennium Development Goals* (RAD-MDGs).

Berdasarkan kebijakan tersebut, peningkatan kinerja pembangunan air minum dan sanitasi menjadi salah satu prioritas nasional sampai dengan 2015 mendatang. Dalam rangka memenuhi tanggungjawab pelaksanaan prioritas nasional tersebut, Kabupaten Sambas menyusun Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 2015-2019 sebagai instrument percepatan daerah dalam mencapai target *Millennium Development Goals*, khususnya target 7C (air minum dan sanitasi) dan instrument pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Air Minum dan Air Limbah sesuai Permen PU No 01/PRT/M/2014.

1.2. Maksud dan Tujuan

RAD AMPL Kabupaten Sambas Tahun 2015-2019 merupakan Dokumen Daerah yang berfungsi sebagai :

- Rencana Peningkatan Kapasitas Pelayanan Air Minum dan Sanitasi yang menerapkan Pendekatan Pamsimas dan Pendekatan Kelembagaan ;
- Instrumen Kebijakan Pengembangan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Jangka Menengah Daerah Tahun 2015 – 2019 ;
- “Channel” Internalisasi Program / Kegiatan dengan Pendekatan Pamsimas ke dalam Program / Kegiatan SKPD yang menangani Bidang AMPL ;

- Acuan Alokasi Anggaran APBD bagi Program-Program Peningkatan Kinerja Pelayanan AMPL ;
- Acuan Pelaksanaan Replikasi Program Pamsimas.

Penerapan RAD AMPL diharapkan memberikan hasil nyata bagi Kabupaten Sambas, yaitu dalam hal Meningkatnya Cakupan Akses dan Kualitas Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Daerah sesuai Target SPM dan target 7C MDGs 2015 dalam rangka mewujudkan Derajat Kesehatan dan Produktivitas Masyarakat yang lebih baik.

Mengingat salah satu fungsi RAD AMPL ini adalah sebagai “channel” internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan Pamsimas ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL, maka program kunci RAD AMPL adalah program-program yang berhubungan dengan :

1. Program Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Air Minum Berbasis Masyarakat ;
2. Program Peningkatan Akses Penggunaan Sanitasi yang Layak ;
3. Program Pemicuan Perubahan Perilaku (PHBS) ;
4. Program Pengelolaan Lingkungan ;
5. Program Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi di Tingkat Masyarakat.

Sistematika RAD AMPL mengacu pada sistematika Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs yang dikeluarkan oleh Pemerintah, dalam hal ini Bappenas melalui Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) No.0445/M.PPN/11/2010. Pada RAD-AMPL, ditambahkan komponen penulisan yang memudahkan Pemda untuk mengintegrasikan program dan kegiatan dalam RAD-AMPL ke dalam dokumen resmi perencanaan dan penganggaran daerah.

1.3. **Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Air Minum dan Penyehatan lingkungan.**

Penyusunan Dokumen RAD-AMPL Kabupaten Sambas didasarkan atas klarifikasi mandat yang bersumber dari produk hukum dan nilai kearifan lokal yang dianut dan berkembang ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Sambas.

Selengkapnya mandat tersebut tersaji pada Tabel berikut:

Tabel 1.1
Klarifikasi Mandat Dokumen RAD-AMPL
Kabupaten Sambas

NO	SUMBER MANDAT	PERNYATAAN MANDAT	SUBSTANSI MANDAT
1.	Undang Undang Dasar 1945, Pasal 33 Ayat 3 (Amandemen ke-5)	Pemanfaatan Kekayaan Alam	Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
2.	Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem	Perlindungan terhadap daerah sumber-sumber air/daerah tangkapan air
3.	Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999	Kehutanan	Perlindungan daerah aliran sungai dan daerah sumber-sumber air
4.	Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004	Sumber Daya Air	Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air
5.	Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	Pendekatan dan sinergisitas pengelolaan perencanaan pembangunan nasional
6.	Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004	Pemerintahan Daerah	Pembagian wewenang pemerintah dan pemerintah daerah
7.	Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004	Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah	Pengelolaan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah
8.	Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan dan pengendalian persampahan

NO	SUMBER MANDAT	PERNYATAAN MANDAT	SUBSTANSI MANDAT
9.	Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih menjamin terwujudnya kehidupan yang sehat dan layak
10.	Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009	Kesehatan	Hak asasi masyarakat terhadap pelayanan bidang kesehatan
11.	Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001	Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	Pengelolaan dan pengendalian kualitas air dan pencemaran air
12.	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004	Perlindungan Hutan	Perlindungan hutan yang menjamin lestariannya daerah sumber-sumber air
13.	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Keharusan setiap daerah memiliki strategi pembangunan air minum dan sanitasi
14.	Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014	Target cakupan layanan/akses air minum, persampahan, Stop BABS dan drainase lingkungan wilayah strategis perkotaan
15.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 20/PRT/M/2006	Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-sPAM)	Penyelenggaraan untuk menjamin pelayanan air minum yang berkualitas
16.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 21/PRT/M/2006	Kebijakan dan Strategi Nasional Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP)	Penyelenggaraan permukiman sehat yang bersih dari sampah
17.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 16/PRT/M/2008	Kebijakan dan Strategi Nasional Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP)	Pengembangan system pengelolaan air limbah permukiman yang ramah lingkungan
18.	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor.741/MENKES/PER/VII/2008	Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota	Penyelidikan epidemiologi kurang dari 24 jam dan desa siaga aktif 80% tahun 2015

NO	SUMBER MANDAT	PERNYATAAN MANDAT	SUBSTANSI MANDAT
19.	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 828/Menkes/SK/IX/2008	Petunjuk Teknis Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota	Teknis pelaksanaan pelayanan minimal bidang kesehatan di kabupaten/kota
20.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 14/PRT/M/2010	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan target penyehatan lingkungan permukiman (sanitasi lingkungan dan persampahan)
21.	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010	Persyaratan Kualitas Air Minum	Persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti oleh seluruh penyelenggara air minum
22.	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010	Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum	Pengelolaan pengawasan kualitas air minum
23.	Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990	Pengelolaan Kawasan Lindung	Pengelolaan perlindungan daerah resapan air dan sumber- sumber air
24.	Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010	Pembangunan Yang Berkeadilan (Percepatan MDGs)	Mengurangi separuh pada tahun 2015, dari proporsi penduduk yang tidak memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi (Target MDGs)
25.	Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat	Kebijakan Nasional AMPL- BM	Pedoman pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat
26.	Perda Kabupaten Sambas Nomor 06 Tahun 2000	Retribusi Persampahan dan Kebersihan	Retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan Kabupaten Sambas
27.	Perda Kabupaten Sambas Nomor 7 tahun 2010	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas	Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas

NO	SUMBER MANDAT	PERNYATAAN MANDAT	SUBSTANSI MANDAT
28.	Peraturan Bupati Sambas Nomor 10 Tahun 2006	Motto Kota Sambas	Sambas BERIAS (Bersih, Indah, Asri dan Sejuk)
29.	Keputusan Bupati Sambas Nomor 117 Tahun 2011	Pembentukan Pokja AMPL Kabupaten Sambas Tahun 2011	Penunjukkan Personil SKPD terkait dengan pembangunan AMPL, dan upaya Sinkronisasi Pembangunan AMPL di Daerah
30.	Keputusan Bupati Sambas Nomor 050/Bappeda/2013 tgl.21 Feb 2013	Pembentukan Pokja Sanitasi Kabupaten Sambas Tahun 2013	Penunjukkan Personil SKPD terkait dengan pembangunan AMPL, dan upaya Sinkronisasi Pembangunan AMPL di Daerah

Sumber : *Data Lokakarya Perumusan Renstra AMPL, Pokja AMPL Kab. Sambas, 2013.*

1.4. Ruang Lingkup Rencana Aksi Daerah

Lingkup materi pada Dokumen RAD-AMPL adalah menjelaskan kondisi eksisting Kinerja Pembangunan AMPL Daerah, Analisis Potensi dan Tantangan yang harus disikapi dalam Pembangunan AMPL melalui Penetapan Arah dan Kebijakan Pembangunan AMPL yang dituangkan dalam Rumusan Visi dan Misi, Issu Strategis, dan Strategi Pembangunan AMPL yang meliputi Tujuan Strategis, Sasaran Pembangunan, Kebijakan serta Program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang (2015-2019) sebagai Acuan seluruh SKPD terkait dalam Pembangunan AMPL Kabupaten Sambas.

Tabel 1.2.

Definisi Sarana Air Minum dan Sanitasi yang Layak / Improved

Sarana	Improved/Layak	Unimproved*)/Tidak layak
Air Minum	<ul style="list-style-type: none"> - House connection (Sambungan rumah (SR)) - Standpost/pipe (hidran) - Borehole (sumur bor) - Protected spring or well (sumur terlindungi) - Collected rain water (air hujan) - Water disinfected at the point of use 	<ul style="list-style-type: none"> - Unprotected well (sumur tak terlindungi) - Unprotected spring (mata air tak terlindungi) - Vendor-provided water (Air dari penjual/pedagang) - Bottled water (Air kemasan) - Water provided by tanker truck (air dari tanker truck)
Sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> - Sewer connection (sewer) - Septic tank - Pour flush (closet duduk) - Simple pit latrine (cubluk) - Ventilated Improved Pit-latrine (cubluk dengan ventilasi udara) 	<ul style="list-style-type: none"> - Service or bucket latrines - Public latrines - Latrines with an open pit

*) Karena tidak aman atau harga per satuannya lebih mahal
 Sumber: Global Water Supply and Sanitation 2000 Report

BAB II

KONDISI UMUM PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

2.1 Kondisi Saat Ini

Kabupaten Sambas merupakan salah satu dari 14 kabupaten/kota yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat Dengan luas wilayah administrasi **6.395,70 Km²**, pada tahun **2013** penduduk Kabupaten Sambas tercatat sebanyak **515.571** jiwa, dengan jumlah penduduk terbesar berada di **Kecamatan Tebas**. Adapun kecamatan dengan **Kepadatan Penduduk** tertinggi adalah **Kecamatan Pemangkat** dengan Kepadatan Penduduk **411 jiwa/km²**.

Dengan rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk per tahun sebesar **1,25 %/tahun** maka pada tahun **2019**, jumlah penduduk Kabupaten sambas diperkirakan berjumlah **555.468** jiwa, dengan **jumlah penduduk** terbesar di **Kecamatan Tebas** dan **kepadatan penduduk** tertinggi di **Kecamatan Pemangkat**.

Jumlah Penduduk Tahun 2013 dan Proyeksi Jumlah Penduduk Tahun 2019 menurut Kecamatan, ditampilkan pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1.
Jumlah Penduduk Tahun 2013 dan Prediksi Tahun 2019 Kabupaten Sambas

No.	Kecamatan	Tahun 2013		Prediksi Tahun 2019	
		Jumlah /Jiwa	Luas Wilayah /Ha	Jumlah /Jiwa	Luas Wilayah /Ha
1	Kecamatan Selakau	31,295	12,951.00	33,717	12,951.00
2	Kecamatan Selakau Timur	10,950	16,299.00	11,797	16,299.00
3	Kecamatan Pemangkat	45,599	11,100.00	49,128	11,100.00
4	Kecamatan Semparuk	24,723	9,015.00	26,636	9,015.00
5	Kecamatan Salatiga	15,042	8,275.00	16,206	8,275.00
6	Kecamatan Tebas	65,908	39,564.00	71,008	39,564.00
7	Kecamatan Tekarang	14,083	8,316.00	15,173	8,316.00
8	Kecamatan Sambas	48,420	24,666.00	52,167	24,666.00
9	Kecamatan Subah	17,712	64,455.00	19,083	64,455.00
10	Kecamatan Sebawi	16,386	16,145.00	17,654	16,145.00

No.	Kecamatan	Tahun 2013		Prediksi Tahun 2019	
		Jumlah / Jiwa	Luas Wilayah / Ha	Jumlah / Jiwa	Luas Wilayah / Ha
11	Kecamatan Sajad	10,152	9,494.00	10,938	9,494.00
12	Kecamatan Jawai	35,456	19,399.00	38,200	19,399.00
13	Kecamatan Jawai Selatan	17,653	9,351.00	19,019	9,351.00
14	Kecamatan Teluk Keramat	59,296	55,443.00	63,885	55,443.00
15	Kecamatan Galing	19,961	33,300.00	21,506	33,300.00
16	Kecamatan Tangaran	23,117	18,667.00	24,906	18,667.00
17	Kecamatan Sejangkung	24,075	29,126.00	25,938	29,126.00
18	Kecamatan Sajingan Besar	10,957	139,120.00	11,805	139,120.00
19	Kecamatan Paloh	24,786	114,884.00	26,704	114,884.00
	TOTAL	515,571	639,570.00	555,468	639,570.00

Sumber : Sambas Dalam Angka 2013 & Proyeksi Pertumbuhan Penduduk = 1,25 % / Tahun

2.1.1 Air Minum

Status capaian Kinerja Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Sambas dengan menggunakan Indikator target 7C tersebut pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. **59,19%** rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan dan perdesaan :
 - a. **33,44%** rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak- perkotaan;
 - b. **47,74%** rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak-perdesaan.
2. **83,79%** rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan:
 - a. **82,76%** rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak- perkotaan;
 - b. **83,33%** rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak- perdesaan.

Ditinjau dari Sistem Penyediaan Air Minum-nya, Capaian Kinerja Pelayanan Air Minum Kabupaten Sambas menurut Jaringan Perpipaian dan Non Perpipaian ditampilkan dalam Tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2.
Jumlah Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Tahun 2013

No	Kecamatan	PDAM	Sumur Gali	Mata Air	Sumur Bor	PAH	Lain-lain	Jumlah Total (unit)
1	Selakau	6,500	-	500	-	15,850	-	22,850
2	Selakau Timur	450	250	-	-	7,935	-	8,635
3	Pemangkat	10,992	5,380	-	-	9,156	-	25,528
4	Semparuk	3,348	300	-	-	3,450	-	7,098
5	Salatiga	9,650	455	500	-	3,541	-	14,146
6	Tebas	16,586	555	5,779	250	14,780	-	37,950
7	Tekarang	-	3,875	-	-	4,875	-	8,750
8	Sambas	18,970	1,385	4,779	-	9,850	-	34,984
9	Subah	240	50	4,779	-	2,755	-	7,824
10	Sebawi	5,220	-	1,000	-	2,005	-	8,225
11	Sajad	-	-	-	-	3,850	-	3,850
12	Jawai	-	2,625	-	650	5,900	288	9,413
13	Jawai Selatan	1,610	3,165	-	-	3,400	-	8,175
14	Teluk Keramat	4,468	3,842	-	250	15,450	-	24,010
15	Galing	1,080	-	-	-	9,880	-	10,960
16	Tangaran	600	8,875	-	-	13,395	-	22,870
17	Sejangkung	3,430	325	-	-	4,900	-	8,655
18	Sajingan Besar	1,450	-	7,399	-	350	-	9,199
19	Paloh	3,340	14,275	-	250	5,622	-	23,487
	Total	87,934	45,357	24,736	1,400	137,182	288	296,609

Sumber : Kompilasi Data Teknis SKPD Kab. Sambas Tahun 2013

2.1.2 Sanitasi

Pada Indikator Akses Sanitasi Layak, dibandingkan dengan Capaian Provinsi pada Tahun 2013, status Capaian Kinerja Pelayanan Sanitasi Kabupaten Sambas (53,79%) relative tertinggal dari Rata-rata Capaian Provinsi (60,00%). Capaian ini juga relative tertinggal dibandingkan Target MDG's 2015 (62,41%).

Tabel 2.3.
Jumlah Rumah Tangga Menurut Jenis Sarana Sanitasi Tahun 2013

No.	Kecamatan	Jamban Cemplung (unit)	Jamban Plengsengan (unit)	Jamban Kloset (unit)	Jamban Helikopter (unit)	Jamban MCK Umum (unit)	Jamban Total (unit)
1	Selakau	14,360	-	645	-	-	15,005
2	Selakau Timur	3,685	170	870	-	-	4,725
3	Pemangkat	16,845	3,375	4,135	-	-	24,355
4	Semparuk	11,785	4,340	2,670	75	125	18,995
5	Salatiga	3,825	-	2,160	-	-	5,985
6	Tebas	29,305	1,995	6,110	-	-	37,410
7	Tekarang	9,280	325	285	50	125	10,065
8	Sambas	10,905	1,400	2,915	50	-	15,270
9	Subah	3,520	730	2,040	-	-	6,290
10	Sebawi	4,820	1,175	725	-	-	6,720
11	Sajad	3,200	3,925	-	-	855	7,980
12	Jawai	24,795	2,810	1,545	125	-	29,275
13	Jawai Selatan	5,635	605	2,365	-	-	8,605
14	Teluk Keramat	22,910	2,530	2,940	75	-	28,455
15	Galing	5,660	3,970	3,710	-	-	13,340
16	Tangaran	11,455	1,970	200	-	-	13,625
17	Sejangkung	8,305	415	915	-	-	9,635
18	Sajingan Besar	760	2,260	590	-	-	3,610
19	Paloh	18,825	890	-	-	-	19,715
	Jumlah	209,875	32,885	34,820	375	1,105	279,060

Sumber : Renstra AMPL Kab. Sambas 2012 - 2016

Tabel 2.4.

Perkembangan Kinerja Pelayanan AMPL Kab. Sambas Tahun 2011 – 2013

No	Indikator	Capaian Kabupaten/ Kota		Capaian Provinsi		Capaian Nasional		Target Kabupaten	Target Nasional
		2012	2013	2012	2013	2012	2013	2019	2019
1	Cakupan penduduk (%) dengan akses air minum yang layak	-	59,19	-	61,65	47,71	-	90,00	100
	Perkotaan	-	57,31	-	-	49,82	-	-	100
	Perdesaan	-	34,75	-	-	45,72	-	-	100
2	Cakupan penduduk (%) dengan akses sanitasi yang layak	-	53,79	-	60,00	51,19	-	85,00	100
	Perkotaan	-	-	-	-	69,51	-	-	100
	Perdesaan	-	-	-	-	33,96	-	-	100

2.2 Permasalahan

2.2.1. Air Minum

Air Minum merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi penduduk baik untuk memasak dan minum maupun mencuci dan mandi. Di Kabupaten Sambas, khususnya di daerah pedalaman secara tradisional penggunaan air bersih masih bersumber dari sungai, gunung dan air hujan. Program pembangunan AMPL sebelumnya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, antara lain melalui Proyek Pembangunan Sarana Sanitasi dan Prasarana Air Bersih Perdesaan.

Layanan air minum di Kabupaten Sambas dilaksanakan melalui Pelayanan PDAM, Prakarsa Masyarakat dan Program-Program terkait seperti CWSHP, PNPM,

serta program dinas terkait yang dibiayai melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan melalui Dana Tugas Perbantuan (TP).

Sebagian besar Penduduk Kabupaten Sambas masih mengandalkan Penampungan Air Hujan (PAH) sebagai Sumber Air Minum dan Air Bersih untuk aktifitas keseharian yaitu sebesar : **20,98%**, sedangkan penggunaan Sumur Boor masih rendah yaitu sebesar : **0,20%**.

Cakupan Air Minum berdasarkan Jenis Layanan di Kabupaten Sambas selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Cakupan Air Minum berdasarkan Jenis Layanan di Kabupaten Sambas

No	Jenis Layanan	Cakupan Air Minum	
		Jiwa	Persentase
1.	Perpipaan	40.254	8,11
	Ledeng	40.254	8,11
2.	Non Perpipaan	165.232	33,30
	- PMA	14.678	2,96
	- PAH	104.097	20,98
	- SGL	45.457	9,16
	- Sumur Bor	1.000	0,20
	JUMLAH	205.486	41,42

Sumber : *Kompilasi Data Teknis SKPD Tahun 2011, Pokja AMPL Kab. Sambas.*

Tabel 2.6
Cakupan Akses Air Minum di Kabupaten Sambas

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	PERPIPAAN		NON PERPIPAAN										JUMLAH TOTAL	
			LEDENG		PMA		PAH		SGL		SUMUR		JUMLAH		JUMLAH TOTAL	JUMLAH TOTAL
			JIWA	%	JIWA	%	JIWA	%	JIWA	%	JIWA	%	JIWA	%		
1	Selakau	30.072	2.570	8,55	500	1,66	8.750	29,10	-	-	-	-	9.250	30,76	11.820	39,31
2	Selakau Timur	10.200	-	-	-	-	5.475	53,68	250	2,45	-	-	5.725	56,13	5.725	56,13
3	Pemangkat	44.589	9.642	21,62	-	-	5.251	11,78	5.380	12,07	-	-	10.631	23,84	20.273	45,47
4	Semparuk	23.765	3.348	14,09	-	-	3.450	14,52	300	1,26	-	-	3.750	15,78	7.098	29,87
5	Salatiga	14.671	-	-	500	3,41	3.541	24,14	455	3,10	-	-	4.496	30,65	4.496	30,65
6	Tebas	63.613	8.616	13,54	1.000	1,57	7.770	12,21	505	0,79	250	0,39	9.525	14,97	18.141	28,52
7	Tekarang	13.293	-	-	-	-	4.875	36,67	3.875	29,15	-	-	8.750	65,82	8.750	65,82
8	Sambas	44.979	14.890	33,10	-	-	7.095	15,77	1.335	2,97	-	-	8.430	18,74	23.320	51,85
9	Subah	17.527	-	-	4.779	27,27	2.755	15,72	50	0,29	-	-	7.584	43,27	7.584	43,27
10	Sebawi	15.598	-	-	500	3,21	2.505	16,06	-	-	-	-	3.005	19,27	3.005	19,27
11	Sajad	9.936	-	-	-	-	3.850	38,75	-	-	-	-	3.850	38,75	3.850	38,75
12	Jawai	35.042	-	-	-	-	5.850	16,69	2.625	7,49	250	0,71	8.725	24,90	8.725	24,90
13	Jawai Selatan	17.660	-	-	-	-	3.400	19,25	3.165	17,92	-	-	6.565	37,17	6.565	37,17
14	Teluk Keramat	58.675	1.188	2,02	-	-	15.850	27,01	3.842	6,55	250	0,43	19.942	33,99	21.130	36,01
15	Galing	19.653	-	-	-	-	9.880	50,27	-	-	-	-	9.880	50,27	9.880	50,27
16	Tangaran	20.789	-	-	-	-	6.700	32,23	8.875	42,69	-	-	15.575	74,92	15.575	74,92
17	Paloh	23.892	-	-	-	-	2.350	9,84	14.475	60,59	250	1,05	17.075	71,47	17.075	71,47
18	Sajingan Besar	9.848	-	-	7.399	75,13	350	3,55	-	-	-	-	7.749	78,69	7.749	78,69
19	Sejangkung	22.318	-	-	-	-	4.400	19,72	325	1,46	-	-	4.725	21,17	4.725	21,17
KABUPATEN		496.120	40.254	8,11	14.678	2,96	104.097	20,98	45.457	9,16	1.000	0,20	165.232	33,30	205.486	41,42

Sumber : *Kompilasi Data Teknis SKPD Tahun 2011, Pokja AMPL Kab. Sambas*

Tabel 2.7

Permasalahan Mendesak Air Minum

A. Sistem Air Minum Permukiman :

<p>1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana :</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Jumlah SR di Kab.Sambas adalah 6.223 unit (2014), sedangkan jumlah jiwa terlayani adalah sebanyak 31.115 Jiwa <p>Untuk Asumsi 2019 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Penduduk Kab. Sambas tahun 2019 = 555.468 jiwa atau 111.094 KK <p>Kesimpulan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Target Pelayanan 2019 = 90,30% (409.997 Jiwa / 101.250 KK) • Berarti dibutuhkan tambahan = 95.027 Sambungan Rumah (SR) Baru.
<p>B. <u>Lain-lain:</u></p>	
<p>2. Aspek Pendanaan:</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Rendahnya Alokasi Pendanaan dari Pemerintah Daerah (Kabupaten). Berdasarkan Alokasi AMPL dalam APBD 2014 hanya sejumlah : Rp. 1.224.647.320.000,- * Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi. Sampai dengan akhir Tahun 2014, belum ada Pihak Swasta yang berinvestasi dlm bidang Pengelolaan Air Minum di Kabupaten Sambas maupun Perusahaan / BUMD yang mengarahkan CSR nya untuk menangani Permasalahan Air Minum di Kab. Sambas. * Belum Optimalnya Penggalan Potensi Pendanaan dari Masyarakat. <p>Untuk Asumsi 2019 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apabila untuk 1 Jiwa dibutuhkan investasi Rp. 532.812.50, maka dibutuhkan Investasi untuk 409.997 Jiwa sebesar : Rp. 218.451.527.000,- sampai dengan Tahun 2019.

<p>3. Aspek Kelembagaan:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendah dan terbatasnya SDM yang terkait pengelolaan • Rendahnya koordinasi antar instansi / SKPD dalam penetapan kebijakan • Masih kurangnya Pembinaan kepada kelompok masyarakat yang ada
<p>4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya perangkat Perda yang diperlukan dalam pengelolaan SPAM • Belum adanya Perda terkait Restribusi Air Minum Permukiman • Masih kurangnya Tenaga Pengawas terhadap kebocoran Instalasi/jaringan yg ada.
<p>5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam Pemeliharaan Instalasi / jaringan yang ada. • Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan system yang berbasis masyarakat. • Masih kurangnya Sosialisasi & Pembinaan tentang pentingnya Pengelolaan Keuangan & Administrasi BPPAM. • Rendahnya koordinasi antar Instansi/SKPD terkait dalam menggerakkan peran masyarakat. (Bappeda, DPU, Dinas Kesehatan, Badan Lingkungan Hidup, Diknas, Deprindagkop, BPPAKB, BPMPD dan PDAM)
<p>6. Aspek Komunikasi, PMJK dll.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya Sumber Air Baku baik dari segi Kualitas maupun Kuantitas. • Penyaluran Distribusi yang tidak bisa menjangkau seluruh Kecamatan / Desa. • Kurangnya peran serta Media dalam memotivasi Masyarakat / Siswa tentang Air Bersih.

(Tabel Perhitungan Investasi untuk Air Minum terlampir)

2.2.2. Sanitasi

Tabel 2.8.

Permasalahan Mendesak Sanitasi

A. Sistem Sanitasi Permukiman:

1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Jamban keluarga di Kab.Sambas (2014) adalah 79.728 unit, sedangkan jumlahnya penduduknya adalah sebanyak 522.016 KK <p>Untuk Asumsi Tahun 2019 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Penduduk Kab. Sambas tahun 2019 = 555.468 jiwa atau 111.094 KK <p>Kesimpulan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah jamban keluarga (2014) hanya mencapai .66,25% (79.728 KK)
--	--

B. Lain-lain :

2. Aspek Pendanaan:	<p>Rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah. Data SSK (Lampiran D SSK-MPSS) Kab. Sambas menunjukkan untuk Tahun 2014, Alokasi APBD untuk Sanitasi hanya direncanakan sebesar Rp. 7.160.000.000,00. Sedangkan berdasarkan Alokasi AMPL dalam APBD 2014 hanya sejumlah: Rp. 1.224.647.320.000,-</p> <p>Untuk Asumsi 2019 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Apabila untuk 1 KK dibutuhkan investasi Rp. 1.001.000, maka dibutuhkan Investasi untuk 162.139 Jiwa (38.604 KK) sebesar: Rp. 38.642.604.000,- sampai dengan Tahun 2019. ▪ Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi. ▪ Belum optimalnya penggalan potensi pendanaan dari masyarakat.
3. Aspek Kelembagaan:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih rendah dan terbatasnya SDM yang terkait Pengelolaan/Penataan Sanitasi Lingkungan. ▪ Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan (Dinas PU, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan & Badan Lingkungan Hidup)

<p>4. Aspek Peraturan Perundangan dan Penegakan Hukum:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum memadainya perangkat Perda yang diperlukan dalam Pengelolaan Sanitasi Lingkungan. ▪ Belum adanya Perda terkait Restribusi Air Limbah Permukiman & Badan Usaha. ▪ Kurangnya SDM yg berkompeten dalam menjalankan Undang-Undang/Hukum yang ada.
<p>5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih rendahnya kesadaran Masyarakat & Dunia Usaha dalam Pengelolaan Sanitasi Lingkungan. ▪ Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan system yang Berbasis Masyarakat (Alokasi Dana Program Pemberdayaan Masyarakat) di Bidang Sanitasi. ▪ Masih kurangnya sosialisasi serta Pelatihan mengenai Pengelolaan Sanitasi. ▪ Rendahnya Koordinasi Antar Instansi / SKPD terkait dalam menggerakkan peran masyarakat (Bappeda, DPU, Dinas Kesehatan, Badan Lingkungan Hidup, Diknas, Deprindagkop, BPPAKB & BPMPD)
<p>6. Aspek Komunikasi, PMJK dll.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurangnya peran serta Media dalam memotivasi Masyarakat/Siswa tentang Pentingnya Sanitasi yang Sehat. ▪ Kurang konsekwennya Pemda dalam menerapkan RTRW yang dibuat. ▪ Buruknya kontribusi Kerusakan Lingkungan yang disebabkan oleh Perusahaan Sawit sementara penggunaan Dana CSR belum diarahkan ke Sanitasi. ▪ Makin meluasnya abrasi pantai serta pendangkalan muara yg terjadi, menyebabkan saluran darinase tidak berfungsi

(Tabel Jumlah MCK Masyarakat serta Perhitungan Investasi untuk Sanitasi terlampir).

2.3 Tantangan

2.3.1. Air Minum

Air minum merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi penduduk baik untuk memasak dan minum maupun mencuci dan mandi. Berikut tantangan pengembangan air minum di Kabupaten Sambas:

Tabel 2.9.

Tantangan Pengembangan Air Minum

A. Sistem Pengembangan Air Minum:

1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan Pengelolaan dan Cakupan Layanan Air Minum dengan membangun Intake, IPA & Booster baru PDAM di 7 Kecamatan. ▪ Mengadakan 95.027 Sambungan Rumah (SR) PDAM s/d Tahun 2019. ▪ Mengurangi Tingkat Kebocoran / Kehilangan Air pada Distribusi PDAM hingga 10 % pada Tahun 2019. ▪ Meningkatkan Pengendalian dan Identifikasi Sumber Air Baku baik untuk IKK maupun SPAM Desa .
B. <u>Lain-lain:</u>	
2. Aspek Pendanaan :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dibutuhkan Investasi APBD Kabupaten sebesar Rp. 54,995 Milyar per 5 Tahun untuk memenuhi target pencapaian di 2019. ▪ Dibutuhkan Investasi APBD Provinsi sebesar Rp. 48,750 Milyar per 5 Tahun untuk memenuhi target pencapaian di 2019. ▪ Dibutuhkan Investasi APBN sebesar Rp. 114,050 Milyar per 5 Tahun untuk memenuhi target pencapaian di 2019. ▪ Dibutuhkan Investasi Pihak Ke-3 / BUMD / BUMN / Lembaga Donor sebesar Rp. 23,800 Milyar per 5 Tahun untuk memenuhi target pencapaian di 2019
3. Aspek Kelembagaan :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan Keterpaduan Pengelolaan dan Kelembagaan di Bidang Air Minum dengan memperkuat SDM di PDAM maupun BPSMAM. ▪ Memperkuat Kedudukan BPSMAM sebagai salah satu unsur Kelembagaan dalam Pemerintahan Desa.
4. Aspek Peraturan Perundangan dan Penegakan Hukum :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memperkuat status BPSMAM sebagai BUMDes melalui Perda. ▪ Memberikan kemudahan/akses Pengembangan BPSMAM sebagai BUMDes melalui Perda.

- | | |
|---|---|
| <p>5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta ;</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan mengkonsumsi Air PDAM maupun SPAM Perdesaan yang ada. ▪ Meningkatkan Pengalokasian Dana CSR untuk Pengembangan Air Minum di Perdesaan. ▪ Meningkatkan Penanaman Modal Swasta di Bidang Air Minum. ▪ Meningkatkan Keswadayaan & Kemandirian Masyarakat dlm Pengelolaan SPAM sehingga Imenarik Lembaga Donor untuk memberikan bantuan Penguatan (Dana/Administrasi). |
| <p>6. Aspek Komunikasi, PMJK dll.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan Kampanye Air Minum yg sehat melalui Media Cetak & Elektronik. ▪ Menjadikan RAD AMPL sebagai Pedoman Perencanaan Air Minum di semua SKPD s/d Tahun 2019. ▪ Menjadikan Sistem Pengolahan Air Minum Sederhana sebagai Mulok di Sekolah Dasar & Menengah. |

(Tabel Matrix Identifikasi Capaian Strategis Pembangunan AMPL terlampir)

2.3.2. Sanitasi

Tabel 2.10.

Tantangan Pengembangan Sanitasi

A. <u>Sistem Pengembangan Sanitasi</u>	
<p>1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana :</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan Pengelolaan dan Cakupan Layanan Sanitasi / Penyehatan Lingkungan di 19 Kecamatan. ▪ Dibutuhkan minimal 5.000 MCK ++ Umum baru s/d Tahun 2019. ▪ Dibutuhkan minimal 50.000 M' Saluran Drainase baru s/d Tahun 2019. ▪ Dibutuhkan minimal 2 TPA (persampahan) baru s/d Tahun 2019. ▪ Dibutuhkan minimal 200 MCK serta Sistem Sanitasi Baru/Rehab di Sekolah Dasar / Menengah s/d Tahun 2019.

B. Lain-lain:

<p>2. Aspek Pendanaan :</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dibutuhkan Investasi APBD Kabupaten sebesar Rp. 14,985 Milyar per Tahun untuk memenuhi target pencapaian di 2019. ▪ Dibutuhkan Investasi APBD Provinsi sebesar Rp. 14,600 Milyar per Tahun untuk memenuhi target pencapaian di 2019. ▪ Dibutuhkan Investasi APBN sebesar Rp. 20,800 Milyar per Tahun untuk memenuhi target pencapaian di 2019. ▪ Dibutuhkan Investasi Pihak Ke-3/BUMD/BUMN/Lembaga Donor sebesar Rp.0,625 Milyar per Tahun untuk memenuhi target pencapaian di 2019
<p>3. Aspek Kelembagaan :</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan Keterpaduan Pengelolaan dan Kelembagaan Sanitasi / Penyehatan Lingkungan dengan memperkuat SDM di SKPD, Sekolah, Aparatur Pemerintahan Desa & Masyarakat.
<p>4. Aspek Peraturan Perundangan dan Penegakan Hukum:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memperkuat status penanganan Sanitasi / Penyehatan Lingkungan sebagai Salah Satu Mata Anggaran dalam APBDes melalui Perda.
<p>5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta :</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan membangun & memelihara Sarana/Prasarana Sanitasi / Penyehatan Lingkungan yang ada. ▪ Meningkatkan Pengalokasian Dana CSR untuk Pengembangan / Pemeliharaan Sanitasi / Penyehatan Lingkungan di Perdesaan. ▪ Meningkatkan Penanaman Modal Swasta di Bidang Sanitasi / Penyehatan Lingkungan. ▪ Meningkatkan Keswadayaan & Kemandirian Masyarakat dlm Pengelolaan Sistem Sanitasi / Penyehatan Lingkungan sehingga menarik Lembaga Donor untuk memberikan bantuan Penguatan (Dana/Administrasi).
<p>6. Aspek Komunikasi, PMJK dll.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan Kampanye Sanitasi / Penyehatan Lingkungan yg Sehat melalui Media Cetak & Elektronik. ▪ Menjadikan RAD AMPL sebagai Pedoman Perencanaan Sanitasi / Penyehatan Lingkungan di semua SKPD s/d Tahun 2019. ▪ Menjadikan Sanitasi / Penyehatan Lingkungan sebagai Mulok di Sekolah Dasar & Menengah.

BAB III

ISSUE STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Issue Strategis

Setelah melalui Identifikasi Issue-Issue/Permasalahan dan Analisa pada Faktor Lingkungan Internal dan Faktor Eksternal dengan menggunakan alat Analisis SWOT diperoleh Informasi Kekuatan dan Kelemahan Faktor Internal, serta Peluang dan Ancaman Faktor Eksternal terhadap kondisi layanan AMPL di Kabupaten Sambas yang dirumuskan dalam Isu Strategis Pembangunan AMPL, sebagai berikut :

FAKTOR INTERNAL	
KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
Memiliki Pokja AMPL	Kurang Koordinasi Lintas Sektor
Sumber Daya Aparatur yang Memadai	Terbatasnya Sarana dan Prasarana AMPL
Tersedianya Regulasi Terkait AMPL	Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Belum Optimal
Adanya Program Terkait Pembangunan AMPL	Program AMPL Berjalan Secara Parsial/Terfragmentasi
FAKTOR EKSTERNAL	
PELUANG (O)	ANCAMAN (T)
Komitmen Global (MDG's)	Sikap Masyarakat Kurang Partisipatif
Kearifan Lokal (Budaya)	Pencemaran Sumber Air Baku
<i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	Rendahnya Perilaku Masyarakat untuk Hidup Bersih dan Sehat
Sumber Daya Alam yang Potensial	Tingkat Kemiskinan Masih Cukup Tinggi

Dari hasil Analisis SWOT didapatkan rumusan Isu Strategis Pembangunan AMPL yang prioritas dan memerlukan percepatan untuk ditangani/direspon secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam upaya mewujudkan Layanan AMPL Kabupaten Sambas yang Berkualitas Tahun 2019.

Adapun Isu Strategis Pembangunan AMPL adalah sebagai berikut :

Isu Strategis Pembangunan AMPL Kabupaten Sambas
1. Terbatasnya Sarana dan Prasarana AMPL ;
2. Pencemaran Sumber Air Baku, Baik Secara Kualitas Maupun Kuantitas ;
3. Rendahnya Perilaku Masyarakat untuk Hidup Bersih dan Sehat ;
4. Kurangnya Koordinasi Lintas Sektor Pembangunan AMPL.

3.2. Arah Kebijakan 2015 – 2019

Dengan mempertimbangkan Faktor keberhasilan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Pembangunan AMPL secara efektif, maka Pemerintah Kabupaten Sambas merumuskan beberapa Kebijakan Strategis Pembangunan AMPL yaitu sebagai berikut :

Kebijakan Strategis Pembangunan AMPL Kabupaten Sambas
1. Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana AMPL ;
2. Pengelolaan dan Pengendalian Perlindungan Sumber Air Baku, baik Secara Kualitas maupun Kuantitas ;
3. Percepatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dalam Mendukung Optimalisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) ;
4. Pengembangan Lingkungan Sehat ;
5. Sosialisasi secara Sistematis dan Berkelanjutan tentang PHBS ;
6. Optimalisasi Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta (CSR) ;
7. Penguatan Kapasitas Kelembagaan AMPL (Sektor Publik dan Masyarakat).

3.3. Strategi Pencapaian 2015 – 2019

Secara Umum, Tujuan Pembangunan AMPL Kabupaten Sambas adalah : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Layanan AMPL yang Lebih Baik. Sedangkan secara khusus, Tujuan Pembangunan AMPL Kabupaten Sambas merupakan Pernyataan Positif terhadap Isu Strategis Pembangunan AMPL, yaitu sebagai berikut :

Tujuan Strategis Pembangunan AMPL Kabupaten Sambas
1. Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana AMPL ;
2. Terlindunginya Sumber Air Baku, baik secara Kualitas Maupun Kuantitas ;
3. Meningkatnya Perilaku Masyarakat untuk Hidup Bersih dan Sehat ;
4. Meningkatnya Keterpaduan Pengelolaan dan Pembangunan AMPL.

Rumusan yang terkandung dalam Tujuan Strategis merupakan Fokus Pencapaian Operasionalisasi Visi, Misi, Nilai dan Tujuan Akhir Rencana Strategis Pembangunan AMPL Kabupaten Sambas selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari Tahun 2015-2019.

Ruang Lingkup Tujuan Strategis dapat dijabarkan sebagai berikut :

- **Pengelolaan dan Pemenuhan Layanan Air Minum**

Definisi Air Minum yang dimaksudkan dalam hal ini adalah sebagaimana standar yang ditetapkan MDG's, yaitu; Layanan Perpipaan yang mencakup Air Ledeng (PDAM) dan Layanan Non Perpipaan yang mencakup Penampungan Air Hujan (PAH), Pemanfaatan Mata Air terlindungi/Mata Air Grafitasi (PMA/MAG), Sumur Bor dan Sumur Terlindungi (SGL). Ruang lingkup tersebut merupakan upaya pemenuhan air minum mencakup peningkatan cakupan layanan PDAM dan program-program air minum terkait lainnya dari berbagai sumber pembiayaan, termasuk sektor swasta/dunia usaha melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dan swadaya/prakarsa masyarakat sendiri.

• **Pengelolaan dan Pemenuhan Layanan Sanitasi Dasar**

Ruang Lingkup Sanitasi Dasar mencakup Pemenuhan Jamban Keluarga, Saluran Pembuangan Air Limbah Domestik, Akses Fasilitas Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kondisi dan Fasilitas Drainase Lingkungan, khususnya untuk kawasan strategis yang relevan dengan Permasalahan Drainase. Upaya pemenuhan fasilitas penyehatan lingkungan melalui pelaksanaan program rutin SKPD maupun program-program sanitasi terkait lainnya dari berbagai sumber pembiayaan, termasuk sektor swasta/dunia usaha melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dan swadaya/prakarsa masyarakat sendiri.

Berdasarkan Tujuan Strategis tersebut di atas, untuk meningkatkan Pengelolaan dan Cakupan Layanan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan / Sanitasi Dasar berdasarkan Cakupan saat ini serta Target yang ingin dicapai melalui berbagai upaya yang relevan dengan mempertimbangkan Faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang yang dapat dimanfaatkan serta Tantangan riil yang akan dihadapi maka tujuan strategis tersebut dikembangkan menjadi Sasaran dan Kebijakan Strategis yang perlu diambil, yang selanjutnya dijabarkan dalam Program-Program Strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

3.3.1 Sasaran Strategis Pembangunan AMPL

Sasaran Strategis Pembangunan AMPL Kabupaten Sambas berdasarkan Tujuan Strategis, dijabarkan ke dalam Sasaran Pencapaian Pembangunan AMPL sampai dengan tahun 2019 sebagai berikut :

Sasaran Strategis Pembangunan AMPL Kabupaten Sambas
1. Meningkatkan Pengelolaan dan Cakupan Layanan AMPL ;
2. Meningkatkan Pengendalian dan Identifikasi Sumber Air Baku ;
3. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat ;
4. Meningkatkan Keterpaduan Pengelolaan dan Kelembagaan AMPL.

Indikator masing-masing Sasaran Strategis Pembangunan AMPL Kabupaten Sambas berdasarkan Cakupan saat ini dan Target yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2019 dapat dilihat pada Matrik Identifikasi Capaian Strategis.

Sasaran Pembangunan AMPL yang sudah dinyatakan secara Indikatif adalah merupakan Fokus Utama dalam upaya Implementasi atau Realisasi Perencanaan Strategis Pembangunan AMPL. Upaya untuk merealisasikannya akan lebih efektif jika meresponnya dengan sejumlah Kebijakan Strategis. Kebijakan Strategis akan lahir secara baik jika terlebih dahulu menguraikan Faktor Keberhasilan Pembangunan AMPL guna mencapai Sasaran Strategis. Faktor Keberhasilan terdiri dari 2 (dua) bagian yakni :

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat sebagaimana tergambar pada Faktor Internal, yaitu :

1. Faktor Pendukung :

- a) Pemerintah Kabupaten Sambas telah memiliki / membentuk Kelompok Kerja Pembangunan AMPL dan didukung dengan Sumber Daya Aparatur yang cukup memadai untuk melaksanakan Layanan AMPL yang lebih baik.
- b) Tersedianya Regulasi baik secara Nasional maupun Daerah yang terkait dengan Pembangunan AMPL, serta pada SKPD terkait telah dilaksanakannya Program-Program / Kegiatan-Kegiatan yang berhubungan dengan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (AMPL).

2. Faktor Penghambat :

- a) Pada Tahap Perencanaan dan Tahap Implementasi Program/Kegiatan, khususnya Pembangunan AMPL masih dirasakan berjalan secara Parsial/Terfragmentasi. Hal ini disebabkan oleh lemahnya Sistem Koordinasi Lintas Sektoral/SKPD.
- b) Selain terbatasnya Sarana dan Prasarana AMPL, juga yang menjadi penghambat adalah belum terpolakannya Kelembagaan Masyarakat untuk memelihara Sarana dan Prasarana AMPL yang telah terbangun dalam upaya pemanfaatannya secara Mandiri dan Berkelanjutan.
- c) Belum Optimalnya Penegakan Hukum dalam upaya Menjaga Kelestarian Lingkungan dan Pencemaran Sumber Air Baku.

Agar lebih jelas keterkaitan dan hubungan antara Tujuan dan Sasaran dengan Kebijakan Strategis Pembangunan AMPL dalam upaya mewujudkan Misi Pembangunan AMPL Kabupaten Sambas Tahun 2015-2019, maka secara Indikatif disusun Matrik Pengembangan Kebijakan Strategis Pembangunan AMPL pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Pelayanan AMPL Jangka Menengah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja pada Tahun-	
				2014	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana AMPL	Meningkatkan Pengelolaan dan Cakupan Layanan AMPL	- Perpipaan (Ledeng PDAM)	10,35%	13,25%
			- Non Perpipaan	40,44%	76,12%
		Meningkatkan Pengelolaan dan Cakupan Layanan Penyehatan Lingkungan / Sanitasi Dasar	- Saluran Pembuangan Air Limbah Domestik	12,35%	80,00%
			- Jamban	39,40%	100,00%
			- Drainase Lingkungan	15,00%	85,00%
2	Terlindunginya Sumber Air Baku, Baik secara Kualitas maupun Kuantitas	Meningkatkan Pengendalian dan Identifikasi Sumber Air Baku	- Pengendalian Lingkungan Sumber Air Baku	4 lokasi	8 lokasi
			- Identifikasi dan Pemanfaatan Sumber Air Baku	4 lokasi	8 lokasi
3	Meningkatnya Prilaku Masyarakat untuk Hidup Bersih dan Sehat	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Berprilaku Hidup Bersih dan Sehat	- Deklarasi Desa ODF	3 desa	181 desa
			- Deklarasi Desa STBM	5 desa	25 desa

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja pada Tahun-	
				2014	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Meningkatnya Keterpaduan Pengelolaan dan Pembangunan AMPL	Meningkatkan Keterpaduan Pengelolaan dan Kelembagaan AMPL	<ul style="list-style-type: none"> - Penyegaran Pokja Posyandu - Penyegaran Sanitarian Puskesmas - Pengembangan Pokja AMPL Kecamatan - Lokakarya AMPL - Pengembangan Kerjasama BPSAM 	- 27 Puskesmas - 1 kali -	19 kec 27 Puskesmas 19 kec 5 kali 10 Perusahaan

Tabel 3.1.a

Matrik Hasil Identifikasi Capaian Strategis Pembangunan AMPL Kabupaten Sambas

NO.	ISU STRATEGIS	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	
				2011	2016
1.	Terbatasnya sarana dan prasarana AMPL	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana AMPL	Meningkatkan pengelolaan dan cakupan layanan air minum		
			- Perpipaan (Ideng PIDAM)	8,11%	32,00%
			- Non perpipaan (PMA+PAH+SGL+SB)	33,31%	38,00%
			Meningkatkan pengelolaan dan cakupan layanan penyehatan lingkungan/sanitasi dasar		
			- Saluran pembuangan air limbah domestik	1,15%	20,00%
			- Jamban	19,47%	100,00%
- Persampahan	19,49%	80,00%			
- Drainase lingkungan	10,00%	25,00%			
2.	Pencemaran sumber air baku, baik secara kualitas maupun kuantitas	Terlindunginya sumber air baku, baik secara kualitas maupun kuantitas	Meningkatkan pengendalian dan identifikasi sumber air baku		
			- Pengendalian lingkungan sumber air baku	4 lokasi	8 lokasi
			- Identifikasi dan pemanfaatan sumber air baku	4 lokasi	8 lokasi
3.	Rendahnya perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat	Meningkatnya perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat		
			- Deklarasi Desa ODF	3 desa	181 desa
			- Deklarasi Desa STBM	-	5 desa
4.	Kurangnya koordinasi lintas sektor Pembangunan AMPL	Meningkatnya keterpaduan pengelolaan dan pembangunan AMPL	Meningkatkan keterpaduan pengelolaan dan kelembagaan AMPL		
			- Revitalisasi Pokja Posyandu	-	19 kec
			- Penyegaran Sanitarian Puskesmas	27 puskesmas	27 puskesmas
			- Pengembangan Pokja AMPL Kecamatan	-	19 kec
			- Lokakarya/Capacity Building SDM	1 kali	5 kali
- Pengembangan kerjasama (CSR)	-	19 kec			

Tabel 3.1.b

Matrik Pengembangan Kebijakan Strategis Pembangunan AMPL Kabupaten Sambas

NO.	ISU STRATEGIS	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		KEBIJAKAN STRATEGIS
				2011	2016	
1.	Terbatasnya sarana dan prasarana AMPL	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana AMPL	Meningkatkan pengelolaan dan cakupan layanan air minum	41,42%	70,00%	Revitalisasi dan percepatan pembangunan sarana dan prasarana AMPL.
			- Perpipaan (Ideng PDAM)	8,11%	32,00%	
			- Non perpipaan (PMA+PAH+SGL+SB)	33,31%	38,00%	
			Meningkatkan pengelolaan dan cakupan layanan penyehatan lingkungan/sanitasi dasar			
			- Saluran pembuangan air limbah domestik	1,15%	20,00%	
			- Jamban	19,47%	100,00%	
			- Persampahan	19,49%	80,00%	
			- Drainase lingkungan	10,00%	25,00%	
2.	Pencemaran sumber air baku, baik secara kualitas maupun kuantitas	Terlindunginya sumber air baku, baik secara kualitas maupun kuantitas	Meningkatkan pengendalian dan identifikasi sumber air baku			Pengelolaan dan pengendalian perlindungan sumber air baku, baik secara kualitas maupun kuantitas
			- Pengendalian lingkungan sumber air baku	4 lokasi	8 lokasi	
			- Identifikasi dan pemanfaatan sumber air baku	4 lokasi	8 lokasi	
3.	Rendahnya perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat	Meningkatnya perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat			Percepatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dalam mendukung optimalisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Pengembangan Lingkungan Sehat Sosialisasi secara sistematis dan berkelanjutan tentang PHBS
			- Deklarasi Desa ODF	3 desa	181 desa	
			- Deklarasi Desa STBM	-	5 desa	

NO.	ISU STRATEGIS	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		KEBIJAKAN STRATEGIS
				2011	2016	
4.	Kurangnya koordinasi lintas sektor Pembangunan AMPL	Meningkatnya keterpaduan pengelolaan dan pembangunan AMPL	Meningkatkan keterpaduan pengelolaan dan kelembagaan AMPL			Optimalisasi peran serta masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta (CSR) Penguatan Kapasitas kelembagaan AMPL (sektor publik dan masyarakat)
			- Revitalisasi Pokja Posyandu	-	19 kec	
			- Penyegaran Sanitarian Puskesmas	27 puskesmas	27 puskesmas	
			- Pengembangan Pokja AMPL Kecamatan	-	19 kec	
			- Lokakarya/Capacity Building SDM	1 kali	5 kali	
- Pengembangan kerjasama (CSR)	-	19 kec				

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1. Program dan Kegiatan Bidang Air Minum 2015-2019

Tabel 4.1.
Program dan Kegiatan di Bidang Air Minum 2015-2019

No Kode	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana
1.03.1.03 .02.27	1.1. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	1.1.1 Fasilitasi Pembangunan Sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	BAPPEDA
		1.1.2 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	PU CK
		1.1.3 Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Non Perpipaan	PU CK
		1.1.4 Perencanaan Air Bersih	PU CK
		1.1.5 Pembangunan Jaringan Perpipaan Air Minum Daerah Perbatasan	PU CK
		1.1.6 Pengembangan Distribusi Air Minum	PU CK
		1.1.7 Pengembangan Teknologi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah	PU CK
		1.1.8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Limbah	PU CK
		1.1.9 Sharing Pendanaan Dana Pamsimas II	PU CK
		1.1.10 Pengembangan NSPK Bidang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	PU CK

No Kode	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana
		1.1.11. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum, Air Limbah, Persampahan dan Drainase pada Lokasi Pasca Bencana 1.1.12. Pembuatan Intake & IPA , & Pemasangan Pipa Transmisi 1.1.13. Penyediaan Prasarana Air Minum Sumber Riam Cagat dan Riam Meresap 1.1.14. Optimalisasi Percepatan Pelayanan Sumber Sungai Semelagi Hulu	PU CK PDAM PDAM PDAM
1.03.1.0 3.02.30	2.1. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	2.1.1. Pembangunan Sarana & Prasarana Air Bersih Perdesaan 2.1.2. Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana & Prasarana Air Minum 2.1.3. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan SPAM 2.1.4. Pengadaan Penyulingan Air Bersih 2.1.5. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih	PU CK PU CK PU CK BPMPD PDAM
1.04.1.0 3.02.16	3.1. Lingkungan Sehat Perumahan	3.1.1. Pengembangan Air Minum di Kota Sambas 3.1.2. Pemb. IPA & Pemasangan Pipa Transmisi, Distribusi.	PDAM PDAM

No Kode	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana
1.22.1.2 2.01.17	4.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	3.1.3. Penyediaan Sarana Air Bersih & Sanitasi Dasar, terutama bagi MBR.	PU CK
		3.1.4. Optimalisasi Percepatan Pelayanan Daerah Kawasan Industri Semparuk (KIS) Sumber Sungai Sebangkau.	PDAM
		3.1.5. Optimalisasi Percepatan Pelayanan Sumber Danau Sebedang.	PDAM
		3.1.6. Pemasangan Pompa Air Baku dan Pipa Transmisi	PDAM
		3.1.7. Pemeriksaan Kualitas Air	BLH
		3.1.8. Pemeriksaan Kualitas Air	Dinkes
		3.1.9. Sosialisasi Kebijakan Air Bersih & Sanitasi Dasar	Dinkes
		3.1.10. Aksesibilitas Sumber Air Bersih dan Sanitasi Dasar	Dinkes
		4.1.1. Desiminasi Informasi Tepat Guna	BPMPD
		4.1.2. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan SPAM	BPMPD
4.1.3. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Pemilihan Teknologi Air Minum	PU CK		
4.1.4. Pemberian Stimulan Pemb. Air Minum di Desa	BPMPD		

No Kode	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana
		4.1.5. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Air Minum di Desa	BPMPD
1.16.1.1 6.01.16	5.1. Peningkatan Iklim Investasi & Realisasi Investasi	5.1.1. Fasilitasi & Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi Air Minum & Sanitasi 5.1.2. Fasilitasi & Koordinasi Kerjasama CSR di Bidang Air Minum & Sanitasi	Badan Penanaman Modal Daerah BPMPD
1.01.1.0 1.01.15	6.1. PAUD / Wajar 9 Tahun / Pendidikan Menengah / Pendidikan Luar Biasa	6.1.1. Pembangunan SAB & Sanitary 6.1.2. Rehabilitasi Sedang / Berat SAB & Sanitary	Dinkes, Diknas Dinkes, Diknas
1.03.1.0 3.02.27. 11	7.1. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum & Air Limbah	7.1.1. Penyediaan Sarana & Prasarana Air Limbah 7.1.2. Rehabilitasi / pemeliharaan Sarana & Prasarana Air Limbah	PU CK, BLH PU CK, BLH
1.08.1.0 8.01.16	8.1. Pengembangan, Pengelolaan & Konservasi Sungai & Danau	8.1.1. Rehab Kawasan Kritis Daerah Tangkapan Sungai & Danau 8.1.2. Rehab Kawasan Lindung Daerah Tangkapan Sungai & Danau	BLH BLH
1.08.1.0 8.01.17	8.2. Pengembangan, Pengelolaan & Konservasi Sumber Daya Air Lainnya	8.2.1. Peningkatan Partisipasi Sungai & SDA Lainnya. 8.2.2. Peningkatan Konservasi Air Tanah	BLH BLH

No Kode	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana
		8.2.3. Inventarisasi Daerah Sumber-sumber Air Bersih 8.2.4. Study Cakupan Penghijauan dan Sumber Mata Air 8.2.5. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan, Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	BLH BLH Dinas Pertanian
1.22.1.2 2.01.15	9.1. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	9.1.1. Pemberdayaan Lembaga & Organisasi masyarakat Perdesaan 9.1.2. Penyelenggaraan Pendidikan & Pelatihan Tenaga Teknis & Masyarakat 9.1.3. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Bidang AMPL	BPMPD BPMPD BPMPD
1.22.1.2 2.01.16	10.1. Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	10.1.1. Fasilitasi Kemitraan Swasta & UKM di Perdesaan 10.1.2. Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Perekonomian di Bidang AMPL	BPMPD Diskoperindag
1.22.1.2 2.01.19	11.1. Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	11.1.1. Pelatihan Perempuan di Perdesaan dlm Bidang UEP AMPL	BPMPD, BP2AKB

Tabel 4.2.

Program dan Kegiatan di Bidang Sanitasi 2015-2019

No Kode	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana
1.03.1.0 3.02.27	1.1. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	1.1.1. Fasilitas Pembangunan Sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	BAPPEDA
		1.1.2. Pembangunan Saluran Drainase Gorong-Gorong	PU CK
		1.1.3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	PU CK
		1.1.4. Pengembangan Teknologi Pengolahan Air Minum & Air Limbah	PU CK
		1.1.5. Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah	PU CK
		1.1.6. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	PU CK
		1.1.7. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum, Air Limbah, Persampahan dan Drainase pada Lokasi Pasca Bencana	PUCK
		1.1.8. Penyusunan Norma Standar Pedoman dan Kaidah (NSPK) dalam Pengembangan Pengelolaan Sanitasi Lingkungan	PU CK
1.03.1.0 3.02.30	2.1. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	2.1.1. Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan	PU CK
		2.1.2. Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi	PU CK

No Kode	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana		
1.04.1.0 3.02.16	3.1. Lingkungan Sehat Perumahan	3.1.1. Penyediaan Sarana Air Bersih & Sanitasi Dasar, terutama bagi MBR.	PU CK		
		3.1.2. Pengelolaan Sanitasi Lingkungan	PU CK		
1.04.1.0 3.02.16	3.1. Lingkungan Sehat Perumahan	3.1.3. Meningkatkan Kemampuan Pengelolaan Sanitasi Lingkungan Melalui Organisasi, SDM dan Peran Masyarakat	PU CK		
		3.1.4. Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Air Limbah	PUCK		
		3.1.5. Peningkatan Pelayanan Distribusi Drainase	PUCK		
		3.1.6. Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan	PU CK		
		3.1.7. Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan Perumahan	PU CK		
		3.1.8. Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat	DINKES		
		3.1.9. Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat	DINKES		
		3.1.10. Percepatan Sanitasi Lingkungan Pemukiman Perkotaan	PU CK		
		1.22.1.2 2.01.17	4.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	4.1.1. Pemberian Stimulan Pemb. Sanitasi di Desa	BPMPD
				4.1.2. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Sanitasi di Desa	BPMPD

No Kode	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana
1.01.1.0 1.01.15	5.1. PAUD / Wajar 9 Tahun / Pendidikan Menengah / Pendidikan Luar Biasa	5.1.1. Pembangunan SAB & Sanitary 5.1.2. Rehabilitasi Sedang / Berat SAB & Sanitary 5.1.3. Sosialisasi Kebijakan Air Bersih & Sanitasi Dasar 5.1.4. Pembinaan Lingkungan Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat yang Sehat	Dinkes, Diknas Dinkes, Diknas Dinkes PU CK & Dinkes
1.02.1.0 2.01.16	6.1. Upaya Kesehatan Masyarakat	6.1.1. Pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan Materi Air Bersih, Sampah, Limbah, CTPS, Stops BABS dengan Metode CLTS 6.1.2. Pelayanan Kesehatan : Kegiatan Promotif, Kegiatan Preventif, Kegiatan Kuratif dan Rehabilitatif 6.1.3. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	Dinkes Dinkes Diknas
1.03.1.0 3.02.27. 32	7.1. Pemberdayaan Komunitas Perumahan	7.1.1. Fasilitasi Pemb. Sarana & Prasarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat 7.1.2. Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Kelompok Masyarakat	PU CK BPMPD
1.02.1.0 2.01.19	8.1. Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat	8.1.1. Pengembangan Media Promosi & Informasi Sadar Hidup Sehat 8.1.2. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 8.1.3. Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan	Dinkes BPMPD Diknas Dinkes Dinkes

No Kode	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana
1.02.1.0 2.01.21	9.1. Pengembangan Lingkungan Sehat	9.1.1. Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat	BLH
		9.1.2. Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat	Dinkes
1.11.1.1 1.01.18	10.1. Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	10.1.1. Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga dlm Membangun Keluarga Sejahterah	BP2AKB
1.08.1.0 8.01.17	11.1. Pengembangan, Pengelolaan & Konservasi Sumber Daya Air Lainnya	11.1.1. Pengendalian Dampak Pencemaran Lingkungan	BLH
		11.1.2. Penetapan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Keserasian Kawasan dan Lingkungan Hunian Berimbang	PU CK BLH Dishutbun
		11.1.3. Aksesibilitas Sumber Air Bersih dan Sanitasi Dasar	Dinkes
		11.1.4. Pengendalian Dampak Perusakan Lingkungan Hidup	BLH
1.22.1.2 2.01.15	12.1. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	12.1.1. Pemberdayaan Lembaga & Organisasi Masyarakat Perdesaan di Bidang Sanitasi	BPMPD
		12.1.2. Penyelenggaraan Pendidikan & Pelatihan TTM	BPMPD
1.22.1.2 2.01.16	13.1. Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	13.1.1. Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Sanitasi Perdesaan	PU CK

BAB V KEBUTUHAN INVESTASI

Untuk mencapai Target Pelayanan Air Minum sebesar **90,30%** serta Pelayanan Sanitasi sebesar **91,45%** pada Tahun **2019** tentu diperlukan pendanaan yang besar. Disamping itu juga memerlukan sinkronisasi Pendanaan dari APBD Kabupaten-APBD Provinsi-APBN.

5.1. Perkiraan Kebutuhan Investasi

Tabel 5.1.
Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Air Minum

Indikator	Kondisi saat ini (2014)	Kondisi 2019	Tambahan Cakupan Pelayanan	Biaya Investasi per orang (Rp)	Kebutuhan Investasi s/d 2019
Jumlah Penduduk	522.016	555.468			
- Perkotaan	74.522	79.298			
- Perdesaan	447.494	476.170			
Jumlah Penduduk yang dilayani :	91.979	501.976	409.997	532.812,50	218.451.527.000
- Perkotaan	35.000	72.000	37.000	532.812,50	19.714.063.000
- Perdesaan	56.979	429.976	372.997	532.812,50	198.737.464.000
Cakupan Penduduk yang Dilayani :					
- Perkotaan (A)	35.000	72.000	37.000	532.812,50	19.714.063.000
Berbasis Lembaga dan Masyarakat					
A. PDAM	35.000	72.000	37.000	532.812,50	19.714.063.000

Indikator	Kondisi saat ini (2014)	Kondisi 2019	Tambahan Cakupan Pelayanan	Biaya Investasi per orang (Rp)	Kebutuhan Investasi s/d 2019
B. Berbasis Masyarakat	-	-	-	-	-
- Perdesaan (B)	56.979	429.976	372.997	532.812,50	198.737.464.000
Berbasis Lembaga dan Masyarakat					
A. PDAM	-	80.000	80.000	532.812,50	42.625.000.000
B. Berbasis Masyarakat	56.979	349.976	292.997	532.812,50	156.112.464.000
Total Kebutuhan (A + B)	91.979	501.976	409.979	532.812,50	218.451.527.000

Tabel 5.2.

Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Sanitasi

Indikator	Kondisi Saat Ini (2014)	Kondisi 2019	Tambahan Cakupan Pelayanan	Biaya Investasi per Orang (Rp)	Kebutuhan Investasi s/d 2019
Jumlah penduduk	522.016	555.468			
- Perkotaan	74.522	79.298			
- Perdesaan	447.494	476.170			
Jumlah penduduk yang dilayani	345.836	507.975			
- Perkotaan	63.776	77.975	14.199	1.001.000	3.550 KK
- Perdesaan	282.060	430.000	147.940	1.001.000	35.055 KK
Total Kebutuhan	(Dalam KK)		38.604	1.001.000	38.643.128.000

5.2. Rencana Pembiayaan

Tabel 5.3.
RENCANA PEMBIAYAAN

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR	SKPP PERANGKANG JAWAB	KET.
				2015		2016		2017		2018		2019				
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1.03.1.03.02.27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah															
	1. Fasilitas Pembangunan Sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	a. Terintegrasinya program-program dalam RAD AMPL pada Murenbang (Air Minum)	59,25	59,25	20	59,30	20	59,36	20	59,41	20	59,47	20	59,47	BARPEDA	
		b. Terintegrasinya program-program dalam RAD AMPL pada Murenbang (Sanitasi)	83,21	83,21	20	83,24	20	83,28	20	83,31	20	83,35	20	83,35	BARPEDA	
		c. Penambahan CB bagi Pengurus BPSPAM dalam Upaya Membangun BPSPAM menjadi BUMDes (Air Minum)	59,53	59,53	20	59,58	20	59,64	20	59,69	20	59,75	20	59,75	BPMPD	
		d. Adanya sumber-sumber Air Bersih Baru yang Sehat bagi Masyarakat tanpa Merusak Keseimbangan Lingkungan sebagai Daerah Penahan Air	59,81			59,81	30			59,86	30			59,86	BLH	
		e. Adanya Master Plan Penangan Air Limbah Kab. Sambas(Sanitas)	83,38			83,38	150	83,42	150					150,00	BARPEDA	
	2. Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	a. Peningkatan Pelayanan serta Jumlah Pelanggan PDAM	59,92	59,92	1.000	59,95	1.100	59,98	750	60,02	750	60,06	900	60,06	PDAM	
		b. Meningkatnya pelayanan Air Minum di Daerah Perdesaan / Non PDAM	60,11	60,11	1.000	60,17	1.100	60,23	750	60,28	750	60,34	900	60,34	PUCK	
	3. Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Non Perpipaan	a. Perluasan Layanan Air Bersih untuk Daerah yang sudah memiliki Jaringan Perpipaan Berbagai Masyarakat	60,40	60,40	700	60,46	800	60,52	900	60,58	1.000	60,64	1.000	60,64	PUCK	
		b. Penyediaan Air Bersih di Perdesaan	60,70	60,70	500	60,76	600	60,82	500	60,88	500	60,94	500	60,94	PUCK	
		c. Penyediaan Air Bersih di Perkotaan	61,00	61,00	900	61,06	900	61,12	900	61,18	900	61,24	900	61,24	BPMPD	
	4. Perencanaan Air Bersih	a. Evaluasi Fungsi & Isi Dok. RAD AMPL (Air Minum)	61,30	61,30	50	61,36	50	61,42	50	61,48	50	61,54	50	61,54	BARPEDA	
		b. Evaluasi Fungsi & Isi Dok. RAD AMPL (Sanitasi)	83,45	83,45	50	83,49	50	83,52	50	83,56	50	83,59	60	83,59	BARPEDA	
		c. Konsultasi Publik Keuangan & Pengembangan PDAM	61,60			61,60	50					61,66	50	61,66	PDAM	
		d. Penggunaan TTG di PAB di APBDes	61,72	61,72	90	61,76	50	61,84	50	61,90	50	61,96	50	61,96	BPMPD	
		e. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat di Penyehatan Lingkungan (sanitasi)	83,63	83,63	50	83,66	50	83,70	50	83,73	50	83,76	50	83,76	BPMPD	
	5. Pembangunan Jaringan Perpipaan Air Minum Daerah Perbatasan	a. Peningkatan Pelayanan Air Minum di Kec. Gafng, Tekatng, Sejangkung, Sajad & Subah	62,02	62,02	200	62,06	200	62,14	200	62,20	200	62,26	200	62,26	PUCK	
	6. Pengembangan Teknologi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah	a. Penggunaan Teknologi Tepat Guna di PAB	62,32	62,32	50	62,38	50	62,44	50	62,50	50	62,56	50	62,56	BPMPD	
		b. Bantuan TTG di Desa	62,62	62,62	750	62,68	750	62,74	1.000	62,80	1.000	62,86	1.500	62,86	PUCK	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR	SKPD PEMANGGUNG JAWAB	RET.
				2015		2016		2017		2018		2019				
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		c. Tersedianya IPAL Sederhana dlm UKM (Sanitasi)	83,80	83,80	80	83,85	50	83,89	50	83,93	50	83,97	50	83,97	PUSK	
		d. Adanya IPAL yg sesuai utk Industri (Sanitasi)	84,01	84,01	100	84,05	100	84,09	100	84,13	100	84,17	100	84,17	PUSK	
		e. Adanya IPAL yg sesuai utk Pemukiman / Perumahan (Sanitasi)	84,21	84,21	100	84,25	100	84,29	100	84,33	100	84,37	100	84,37	DMPO	
7.	Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Limbah	a. Pengembangan Air Minum di Sambas, Selakau, Sekuru, Tabat, Sempanuk & Pamangkat	62,92	62,92	6.000	62,96	6.000	63,04	6.000	63,10	6.000	63,16	6.000	63,16	PDAM	
		b. Adanya Sanitasi yang Sehat di Setiap Kantor UNIT SKPD (Sanitasi)	84,40	84,40	250	84,44	250	84,47	250	84,51	250	84,54	250	84,54	PUSK	
		c. Adanya Sanitasi yang Sehat di Setiap Puskesmas / RS (Sanitasi)	84,58	84,58	250	84,61	250	84,65	250	84,68	250	84,72	250	84,72	DINKES	
		d. Adanya Sanitasi yang Sehat di Lokasi Pemukiman (Sanitasi)	84,70	84,75	500	84,79	500	84,82	500	84,86	500	84,89	500	84,89	PUSK	
8.	Sharing Pendanaan Dana Pemmas II	a. Dana BLM untuk 1 - 2 Desa	63,22	63,22	220	63,28	220	63,34	440	63,40	440	63,46	440	63,46	PUSK	
		b. Tersedianya Dana Operasional Satker PIP & Pokja AMPL Kabupaten	63,32	63,32	110	63,38	110	63,44	110	63,50	110	63,56	110	63,56	BAPEKEM	
9.	Pengembangan NSPK Bidang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	a. NSPK Bidang Usaha Air Isi Ulang	63,82			63,82	25						63,82	DEPKEM		
		b. NSPK Bidang Usaha Air Isi Ulang	63,88			63,88	20						63,88	BLH		
		c. NSPK Bidang Usaha Air Isi Ulang	63,94			63,94	25						63,94	DEPKES		
10.	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum, Air Limbah, Persampahan dan Drainase pada Lokasi Pasca Bencana	a. Tersedianya Air Bersih yg cukup utk Korban Bencana	64,00	64,00	500	64,06	500	64,12	500	64,18	500	64,24	500	64,24	BPBD	
11.	Pembuatan Intake & IPA dan Pemasangan Pipa Transmisi	a. Peningkatan Pelayanan PDAM di Kec. Daling	64,30	64,30	1.000	64,36	1.000	64,42	1.000	64,48	1.000	64,54	1.000	64,54	PDAM	
		b. Peningkatan Pelayanan PDAM di Kec. Jawa	64,60	64,60	1.000	64,66	1.000	64,72	1.000	64,78	1.000	64,84	1.000	64,84	PDAM	
		c. Peningkatan Pelayanan PDAM di Kec. Sejangkung	64,90	64,90	1.000	64,96	1.000	65,02	1.000	65,08	1.000	65,14	1.000	65,14	PDAM	
		d. Peningkatan Pelayanan PDAM di Kec. Subah	65,20	65,20	1.000	65,26	1.000	65,32	1.000	65,38	1.000	65,44	1.000	65,44	PDAM	
		e. Peningkatan Pelayanan PDAM di Kec. Palih	65,50	65,50	1.000	65,56	1.000	65,62	1.000	65,68	1.000	65,74	1.000	65,74	PDAM	
		f. Peningkatan Pelayanan PDAM di Kec. Takalang	65,80	65,80	1.000	65,86	1.000	65,92	1.000	65,98	1.000	66,04	1.000	66,04	PDAM	
12.	Penyediaan Prasarana Air Minum Sumber Riam Cagat dan Meraap	a. Peningkatan Pelayanan Air Minum di Kec. Sajingan Besar & Palih	66,10			66,10	1.500			66,16	1.500			66,16	PDAM	
13.	Optimalisasi Percepatan Pelayanan Sumber Sungai Semelegi Hulu	a. Pengembangan Air Minum di Kec. Selakau Tus	66,22	66,22	500	66,28	500	66,34	500	66,40	500	66,46	500	66,46	PDAM	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEBANGKA PENYANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR	SRPD PENANGGUNG JAWAB	KET.
				2015		2016		2017		2018		2019				
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1.03.1.03.02.30	Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan															
	1. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan	a. Peningkatan Pelayanan Air Bersih di Tebat	66.52	66.52	150	66.58	150	66.64	150	66.70	150	66.76	150	66.76	PUCK	
		b. Peningkatan Pelayanan Air Bersih di Sajingan Besar	66.82	66.82	150	66.88	150	66.94	150	67.00	150	67.06	150	67.06	PUCK	
		c. Peningkatan Pelayanan Air Bersih di Jawa Selatan	67.12	67.12	150	67.18	150	67.24	150	67.30	150	67.36	150	67.36	PUCK	
		d. Peningkatan Pelayanan Air Bersih di Salatiga	67.42	67.42	150	67.48	150	67.54	150	67.60	150	67.66	150	67.66	PUCK	
		e. Peningkatan Pelayanan Air Bersih di Selakau Timur	67.72	67.72	150	67.78	150	67.84	150	67.90	150	67.96	150	67.96	PUCK	
	2. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan SPAM	a. P/M Pro Aka di 184 Desa	68.02	68.02	25	68.08	25	68.14	50	68.20	50	68.26	50	68.26	PUCK	
		b. Peningkatan CB Aparatur Desa sebagai Pembina BUMDes	68.32	68.32	15	68.38	15	68.44	15	68.50	15	68.56	15	68.56	PUCK	
		c. Desa mampu membuat RAB Air Bersih	68.62	68.62	25	68.68	25	68.74	25	68.80	25	68.86	25	68.86	PUCK	
	3. Pengadaan Penyulingan Air Bersih	a. Peningkatan Pelayanan Air Bersih di Kec. Pemangkat	69.32	69.32	400	69.38	400	69.44	250	69.50	250	69.56	400	69.56	PUCK	
		b. Peningkatan Pelayanan Air Bersih di Kec. Selakau	69.32	69.32	400	69.38	400	69.44	250	69.50	250	69.56	400	69.56	PUCK	
		c. Peningkatan Pelayanan Air Bersih di Kec. Salatiga	69.52	69.52	400	69.58	400	69.64	250	69.70	250	69.76	400	69.76	PUCK	
		d. Peningkatan Pelayanan Air Bersih di Kec. Tekarang	69.82	69.82	400	69.88	400	69.94	250	70.00	250	70.06	400	70.06	PUCK	
		e. Peningkatan Pelayanan Air Bersih di Kec. Seanglung	70.12	70.12	400	70.18	400	70.24	250	70.30	250	70.36	400	70.36	PUCK	
		f. Peningkatan Pelayanan Air Bersih di Kec. Sempanuk	70.42	70.42	400	70.48	400	70.54	250	70.60	250	70.66	400	70.66	PUCK	
		g. Peningkatan Pelayanan Air Bersih di Kec. Subah	70.72	70.72	400	70.78	400	70.84	250	70.90	250	70.96	400	70.96	PUCK	
		h. Peningkatan Pelayanan Air Bersih di Kec. Sajad	71.02	71.02	400	71.08	400	71.14	250	71.20	250	71.26	400	71.26	PUCK	
		i. Peningkatan Pelayanan Air Bersih di Kec. Galing	71.32	71.32	400	71.38	400	71.44	250	71.50	250	71.56	400	71.56	PUCK	
		j. Peningkatan Pelayanan Air Bersih di Kec. Paloh	71.62	71.62	400	71.68	400	71.74	250	71.80	250	71.86	400	71.86	PUCK	
	4. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih	a. Peningkatan Pelayanan Air Bersih di Jawa Selatan	71.92	71.92	1.500	71.98	1.500	72.04	1.500	72.10	1.500	72.16	1.500	72.16	PUCK	
		b. Peningkatan Pelayanan Air Bersih di Tekarang	72.22	72.22	1.500	72.28	1.500	72.34	1.500	72.40	1.500	72.46	1.500	72.46	PUCK	
		c. Peningkatan Pelayanan Air Bersih di Teluk Keramat	72.52	72.52	1.500	72.58	1.500	72.64	1.500	72.70	1.500	72.76	1.500	72.76	PUCK	
		d. Peningkatan Pelayanan Air Bersih di Tangaran	72.82	72.82	1.500	72.88	1.500	72.94	1.500	73.00	1.500	73.06	1.500	73.06	PUCK	
		e. Peningkatan Pelayanan Air Bersih di Paloh	73.12	73.12	1.500	73.18	1.500	73.24	1.500	73.30	1.500	73.36	1.500	73.36	PUCK	
		f. Peningkatan Pelayanan Air Bersih di Seanglung	73.42	73.42	1.500	73.48	1.500	73.54	1.500	73.60	1.500	73.66	1.500	73.66	PUCK	
		g. Peningkatan Pelayanan Air Bersih di Sajad	73.72	73.72	1.500	73.78	1.500	73.84	1.500	73.90	1.500	73.96	1.500	73.96	PUCK	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR	SKOP PENANGGUNG JAWAB	KTT
				2015		2016		2017		2018		2019				
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1.04.1.03.02.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan															
	1. Pengembangan Air Minum di Kota Sambas	a. Peningkatan Pelayanan PDAM di Kota Sambas	74.02	74.02	400	74.08	500	74.14	300	74.20	350	74.26	400	74.28	PDAM	
	2. Pemb. IPA & Pemasangan Pipa Transmisi, Distribusi	a. Peningkatan Pelayanan PDAM di Kota Sekura	74.32	74.32	400	74.38	500	74.44	300	74.50	350	74.56	400	74.56	PDAM	
		b. Peningkatan Pelayanan PDAM di Kota Tebas	74.62	74.62	400	74.68	500	74.74	300	74.80	350	74.86	400	74.88	PDAM	
		c. Peningkatan Pelayanan PDAM di Kota Sempuruk	74.92	74.92	400	74.98	500	75.04	300	75.10	350	75.16	400	75.16	PDAM	
		d. Peningkatan Pelayanan PDAM di Kota Pemangkat	75.22	75.22	400	75.28	500	75.34	300	75.40	350	75.46	400	75.46	PDAM	
		e. Peningkatan Pelayanan PDAM di Kota Selakau	75.52	75.52	400	75.58	500	75.64	300	75.70	350	75.76	400	75.76	PDAM	
		f. Tersedianya Drainase yg baik di Kecamatan (Sanitasi)	84.93	84.93	1.000	84.96	1.000	85.00	1.000	85.03	1.000	85.07	1.000	85.07	PLUCK	
		g. Adanya Sarana MCK yg Pengelolannya Berbasis Masyarakat (Sanitasi)	85.10	85.10	500	85.14	500	85.17	500	85.21	500	85.24	500	85.24	PLUCK	
		h. Adanya Sarana MCK *** yg Pengelolannya Berbasis Masyarakat (Sanitasi)	85.27			85.27	500	85.31	500	85.34	500	85.38	500	85.38	PLUCK	
		i. Adanya IPAL di Lokasi Pendidikan (Sanitasi)	85.41			85.41	500	85.45	500	85.48	500	85.52	500	85.52	PLUCK	
		j. Adanya IPAL di Lokasi Kesehatan (Sanitasi)	85.55	85.55	500	85.59	500	85.62	500	85.66	500	85.69	500	85.69	PLUCK	
		k. Adanya IPAL di Lokasi Perdagangan (Sanitasi)	85.73	85.73	500	85.76	500	85.80	500	85.83	500	85.87	500	85.87	PLUCK	
		l. Adanya IPLT di Permukiman yg Berbasis Masyarakat (Sanitasi)	85.80			85.90	1.000	85.94	1.000	85.97	1.000	86.01	1.000	86.01	PLUCK	
	3. Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin	a. Terciptanya Lingkungan Perumahan Perdesaan yang memiliki Air Minum yg Sehat	85.13	85.13	2.000	85.19	2.000	85.25	2.000	85.31	2.000	85.37	2.000	85.37	PLUCK	
		b. Adanya IPAL di Permukiman Masyarakat Pinggiran Badan Air (Sanitasi)	86.04	86.04	750	86.08	750	86.11	750	86.15	750	86.18	750	86.18	PLUCK	
		c. Adanya IPAL di Permukiman yg Berbasis Masyarakat (Sanitasi)	86.22	86.22	500	86.25	500	86.29	1.000	86.32	1.000	86.36	1.000	86.36	PLUCK	
		d. Adanya Jamban yg Sehat untuk MBR (Sanitasi)	86.39	86.39	250	86.43	250	86.46	250	86.50	250	86.53	250	86.53	PLUCK	
	4. Optimalisasi Percepatan Pelayanan Daerah Kawasan Industri Sempuruk (KIS) Sumber Sungai Sebangkau	a. Pengembangan Air Minum di Kab. Selatiga	85.43	85.43	1.000	85.49	1.000	85.55	1.000	85.61	1.000	85.67	1.000	85.67	PDAM	
	5. Optimalisasi Percepatan Pelayanan Sumber Danau Sebandang	a. Pengembangan Air Minum di Kec. Sebawi	85.73	85.73	500	85.79	500	85.85	500	85.91	500	85.97	500	85.97	PDAM	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR	SEPO PENANGGUNG JAWAB	REK
				2015		2016		2017		2018		2019				
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
	6. Pemertiksaan Kualitas Air	a. Adanya Data Kualitas Sumber Air Baku di 18 Kecamatan	86.03	86.03	90		0	86.05	90		0	86.15	90	86.15	DEPKES	
		b. Adanya Data Kualitas Air Limbah (Sanitasi)	86.67	86.67	20	86.60	20	86.64	20	86.67	20	86.71	20	86.71	BLH	
		c. Adanya Pengawasan terhadap Air Limbah Industri (Sanitasi)	86.74	86.74	30	86.78	50	86.81	75	86.85	100	86.88	100	86.88	BLH	
	7. Sosialisasi Kebijakan Air Bersih & Sanitasi Dasar	a. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat tentang Air Minum & Penyehatan Lingkungan (Air Minum)	86.21	86.21	30	86.27	40	86.33	50	86.39	40	86.45	30	86.46	RUCK	
		b. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat tentang Air Minum & Penyehatan Lingkungan (Sanitasi)	86.92	86.92	30	86.95	40	86.99	50	87.02	40	87.06	30	87.06	RUCK	
	8. Aksesibilitas Sumber Air Bersih dan Sanitasi Dasar	a. Adanya Kran Air untuk Sumber Air Pemadam Kebakaran	86.51	86.51	100	86.57	200	86.63	200	86.69	200	86.76	200	86.75	RUCK	
		b. Tersedianya Air Minum sebagai Antisipasi Musim Kemarau	86.81	86.81	500	86.87	500	86.93	500	86.99	500	87.05	500	87.05	RUCK	
		c. Adanya Alat Angkut Tingi dari Rumah ke PLT (Sanitasi)	87.09			87.09	200	87.13	200	87.18	200	87.20	200	87.20	RUCK	
		d. Adanya Tempat Pembuangan Sampah dari Rumah sbm dibawa ke TPA (Sanitasi)	87.23	87.23	500	87.27	500	87.30	500	87.34	500	87.37	500	87.37	RUCK	
		e. Adanya Sarana CTPS di Pasar, GOR, dll (Sanitasi)	87.41	87.41	200	87.44	300	87.48	300	87.51	300	87.55	300	87.55	RUCK	
		f. Adanya Sarana CTPS di Puskesmas, Posyandu, Poskestes dll (Sanitasi)	87.58	87.58	200	87.62	300	87.65	300	87.69	300	87.72	300	87.72	RUCK	
1.22.1.22.01.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa															
	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan SPAM	a. PJM Pro Aksi di 164 Desa	87.11	87.11	25	87.17	25	87.23	50	87.29	50	87.35	50	87.38	BPMPD	
		b. Peningkatan CB Aparatur Desa sebagai Pembina BUMDes	87.41	87.41	15	87.47	15	87.53	15	87.59	15	87.65	15	87.65	BPMPD	
		c. Desa mampu membuat RAB Air Bersih	87.71	87.71	25	87.77	25	87.83	25	87.89	25	87.95	25	87.95	BPMPD	
	2. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Pemilihan Teknologi Air Minum	a. Desa Mampu Merencanakan PAB Desa sesuai Sumber Air Baku yang ada	88.01	88.01	50	88.07	50	88.13	50	88.19	50	88.25	50	88.25	RUCK	
		b. Aparatur Desa mampu menjadi Pembina Pemilihan Teknologi Air Minum di Desa	88.31	88.31	50	88.37	50	88.43	50	88.49	50	88.55	50	88.55	BPMPD	
	3. Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Air Minum Desa	a. Adanya Partisipasi APBD dalam Sanimas	88.61	88.61	200	88.67	200	88.73	200	88.79	200	88.85	200	88.85	RUCK	
		b. Adanya Partisipasi APBD dalam STEM	88.91	88.91	200	88.97	200	89.03	200	89.09	200	89.15	200	89.15	DEPKES	
	4. Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa (Bidang Air Minum dan Sanitasi)	a. Peningkatan CB Pengurus BPSPAM	89.21	89.21	30	89.27	40	89.33	50	89.39	40	89.45	30	89.45	BPMPD	
		b. Peningkatan CB bagi Pengurus LPM & BPD di Bidang Sanitasi & Penyehatan Lingkungan (Sanitasi)	87.76	87.76	50	87.79	50	87.83	50	87.86	50	87.90	50	87.90	BPMPD	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR	SUDUT PENANCIANG IAWAI	KLT
				2015		2016		2017		2018		2019				
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1.16.1.16.01.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi															
	1. Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Kejasama di Bidang Investasi (Air Minum dan Sanitasi)	e. Adanya Dokumen yang Baik & Lengkap tentang Pengembangan Air Terjun Riam Cagat sebagai Sumber Air Baku (Air Minum)	89,51	89,51	30	89,51	30	92,63	30	89,69	30	89,70	30	89,70	BAPPEDA	
		d. Adanya Dokumen yang Baik & Lengkap tentang Pengembangan Air Terjun Riam Cagat sebagai Sumber Air Baku (Sanitasi)	87,93	87,93	20	87,97	20	86,00	20	86,04	20	88,07	20	88,07	BAPPEDA	
		c. Ekspose Pengembangan PDAM untuk PMA / PMDN	88,80	88,80	30	89,85	30	88,90	30	89,95	30	90,00	30	90,00	BAPPEDA	
		d. Adanya Peningkatan Jumlah PMA / PMDN dalam Bidang Air Minum.	90,05	90,05	30	90,11	30	90,15	30	90,20	30	90,25	30	90,25	Badan Penanaman Modal/BUMD	
		e. Adanya Dokumen yang Baik & Lengkap tentang Pengembangan PLT sebagai BUMD (Sanitasi)	88,51	88,11	30	88,145	30	88,18	30	88,215	30	88,25	30	88,25	BAPPEDA	
		f. Adanya Dokumen yang Baik & Lengkap tentang Pengembangan TPA terpadu sebagai BUMD (Sanitasi)	88,28	88,28	30	88,33	30	88,365	30	88,39	30	88,425	30	88,42	BAPPEDA	
	2. Fasilitas & Koordinasi Kejasama CSR di Bidang Air Minum dan Sanitasi	a. Adanya Dana CSR untuk Bidang Air Minum	90,30	90,3	30	90,345	30	90,385	30	90,445	30	90,495	30	90,50	BAPPEDA	
		b. Adanya Dana CSR untuk kampanye Bidang Air Minum	90,55	90,55	30	90,595	30	90,645	30	90,695	30	90,745	30	90,75	DIRNAS	
		c. Adanya Dana CSR untuk Pengolahan Limbah (Sanitasi)	88,48	88,48	50	88,495	50	88,50	50	88,505	50	88,5	50	88,50	BLH	
		d. Adanya Dana CSR untuk Penanganan Masalah Persampahan (Sanitasi)	88,63	88,63	25	88,67	25	88,700	25	88,74	25	88,775	25	88,77	PUGK	
		JUMLAH ANGGARAN SUB UNIT 1			47.406		52.870		48.880		50.465		51.846		250.766	
1.01.1.01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini / Wajib Belajar 9 tahun / Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar Biasa															
	1. Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary	a. PAB untuk 20 Sekolah Dasar per Tahun	90,80	90,80	500	90,85	500	90,90	500	90,95	500	91,00	500	91,00	DIRNAS	
		b. PAB untuk 10 Sekolah Menengah per Tahun	91,05	91,05	300	91,10	300	91,15	300	91,20	300	91,25	300	91,25	DIRNAS	
		c. PAB untuk 5 Sekolah Menengah Atas / SMK per Tahun	91,30	91,30	200	91,35	200	91,40	200	91,45	200	91,50	200	91,50	DIRNAS	
		d. PAB utk SLB & Paket A-C	91,55	91,55	100	91,60	100	91,65	100	91,70	100	91,75	100	91,75	DIRNAS	
		e. PAB untuk 5 PAUD / TK per tahun	91,80	91,80	100	91,85	100	91,90	100	91,95	100	92,00	100	92,00	DIRNAS	
		f. Adanya WC / Jamban yg sehat di Sekolah (Sanitasi)	88,81	88,81	200	88,84	200	88,88	200	88,91	200	88,95	200	88,95	DIRNAS	
		g. Adanya Sarana CTPS di Sekolah (Sanitasi)	88,98	88,98	100	89,02	100	89,05	100	89,08	100	89,12	100	89,12	DIRNAS	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR	SOPD PENANGGUNG JAWAB	BCT
				2015		2016		2017		2018		2019				
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	2. Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary	a. Peningkatan Pelayanan Air Minum utk Siswa	92,05	92,05	250	92,10	250	92,15	250	92,20	250	92,25	250	92,25	DIKNAS	
		b. Adanya Drainase yg baik di Sekolah (Sanitasi)	89,16	89,16	100	89,19	200	89,23	300	89,26	400	89,30	500	89,30	DIKNAS	
		c. Adanya WC / jamban yg sehat di Sekolah (Sanitasi)	89,33	89,33	250	89,37	250	89,40	250	89,44	250	89,47	250	89,47	DIKNAS	
	JUMLAH ANGGARAN SUB UNIT II				2.100		2.205		2.300		2.400		2.500		11.500	
1.08.1.08.01.16 & 1.08.1.08.01.17	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air lainnya.															
	1. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	a. Meningkatnya kesadaran Masyarakat tentang Air Minum yang Sehat	93,54	93,54	75	93,59	75	93,64	75	93,69	75	93,74	75	93,74	BRMFO	
		b. Peningkatan Kampanye tentang Air Minum yang Sehat	93,79	93,79	50	93,84	50	93,89	50	93,94	50	93,99	50	93,99	BLH	
	2. Kegiatan Peningkatan Konservasi Air Tanah	a. Perlindungan terhadap Gunung Semujur sebagai Daerah Relapian Air	94,04	94,04	50	94,09	50	94,14	50	94,19	50	94,24	50	94,24	PDAM	
		b. Perlindungan terhadap Gunung Selindung sebagai Daerah Resapan Air	94,29	94,29	50	94,34	50	94,39	50	94,44	50	94,49	50	94,49	PDAM	
		c. Perlindungan terhadap Gunung Gajah sebagai Daerah Resapan Air	94,54	94,54	50	94,59	50	94,64	50	94,69	50	94,74	50	94,74	PDAM	
	3. Inventarisasi Daerah Sumber-sumber Air Bersih	a. Penyediaan Database Daerah-Daerah Sumber Air Baku	94,79	94,79	50	94,84	50	94,89	50	94,94	50	94,99	50	94,99	BARPEDA	
	4. Study Cakupan Penghijauan dan Sumber Mata Air	a. Terpeliharanya Jumlah Air Tanah yg ada pada Sumber Mata Air yang ada	95,04	95,04	25	95,09	25	95,14	25	95,19	25	95,24	25	95,24	BLH	
	5. Pengembangan dan Pengelolaan Jamban, Igaki, Rawe dan Jaringan Pengaliran Lainnya	a. Meningkatnya Pelayanan Igaki untuk Peningkatan Hasil Pertanian	95,29	95,29	2000	95,34	2000	95,39	2000	95,44	2000	95,49	2000	95,49	Ditjen	
		b. Terjaganya Fungsi Daerah Rawe sbg Perlahan Erosi dan Muatla yang baik	95,54	95,54	2000	95,59	2000	95,64	2000	95,69	2000	95,74	2000	95,74	SDA & Pengaliran - PU	
	6. Aksesibilitas Sumber Air Bersih dan Sanitasi Dasar	a. Adanya Sarana CTPS di Pasar, GOR, dll (Sanitasi)	99,89	99,89	200	99,93	300	99,97	300	99,99	300	99,99	300	99,99	DIKHEP	
		b. Adanya Sarana CTPS di Puskesmas, Posyandu, Poskesdes dll (Sanitasi)	99,09	99,09	200	99,13	300	99,17	300	99,21	300	99,25	300	99,25	DIKHEP	
	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai & Danau															
	1. Kegiatan Rehabilitasi Kawasan Kritis Daerah Tangkapan Sungai dan Danau	a. Penanaman 2.000 Batang Baku per Tahun untuk 5 Kecamatan tersebut	92,30	92,30	100	92,35	100	92,40	100	92,45	100	92,50	100	92,50	BLH	
		b. Peningkatan Pelayanan Untuk Masyarakat sebagai antrepeki Musim Kemarau	92,55	92,55	100	92,60	100	92,65	100	92,70	100	92,75	100	92,75	PUCK	
		c. Terpeliharanya Fungsi Sungai / Pant sebagai Daerah Buangan Limbah (Sanitasi)	89,51	89,51	100	89,54	100	89,58	100	89,61	100	89,65	100	89,65	SDA - PU	
		d. Peningkatan Pelayanan Untuk Masyarakat sebagai antrepeki Musim Kemarau (Sanitasi)	89,69	89,69	100	89,73	100	89,77	100	89,81	100	89,85	100	89,85	SDA - PU	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR	SRPD PENYALINGAMU JAWAH	KTT
				2015		2016		2017		2018		2019				
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	2. Kegiatan Rehabilitasi Kawasan Lindung dan Daerah Tangkapan Sungai dan Danau	a. Perlindungan Mata Air sbg Sumber Air Baku PDAM	92.80	92.80	100	92.80	100	92.90	100	92.98	100	93.00	100	93.00	BLH	
		b. Perlindungan Mata Air sbg Sumber Air Baku PDAM	93.05	93.05	100	93.10	100	93.15	100	93.20	100	93.24	100	93.24	BLH	
		c. Perlindungan Mata Air sbg Sumber Air Baku PDAM	93.29	93.29	100	93.34	100	93.38	100	93.44	100	93.49	100	93.49	BLH	
JUMLAH ANGGARAN SUB UNIT III						5.460	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660		28.050			
1.22.1.22.01.16	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan															
	1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	a. Peningkatan Peran KMA yg ada terhadap Pelestarian Lingkungan	95.79	95.79	10	95.84	10	95.89	10	95.94	10	95.98	20	95.99	BPMPD	
		b. Meningkatkan Motivasi Masyarakat dlm Pelestarian Lingkungan	96.04	96.04	10	96.09	10	96.14	10	96.19	10	96.24	20	96.24	BPMPD	
		c. Kampanye Stop BABS & PHBS oleh Kader Posyandu (Sanitasi)	90.29	90.29	50	90.33	50	90.37	50	90.41	50	90.45	50	90.45	Dirkek	
	2. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	a. Peningkatan Peran Tomas & Topa yg ada terhadap Pelestarian Lingkungan	96.30	96.30	50	96.36	50	96.41	50	96.47	50	96.53	50	96.53	BLH	
		b. Peningkatan Peran Aparatur Desa terhadap Pelestarian Lingkungan	96.59	96.59	50	96.65	50	96.70	50	96.76	50	96.82	50	96.82	BPMPD	
		c. Pelatihan Teknis Pengelolaan Air Limbah sesuai SNI (Sanitasi)	90.49	90.49	50	90.53	50	90.57	50	90.61	50	90.65	50	90.65	BLH	
		d. Pelatihan CB bagi Kader Desa / Teknis dlm Bidang Sanitasi & Persehatan Lingkungan (Sanitasi)	90.69	90.69	50	90.73	50	90.77	50	90.81	50	90.85	50	90.85	BPMPD	
	3. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Bidang AMPL	a. Peningkatan CB & Peran Aparatur Desa dlm Pengelolaan AMPL (Air Minum)	90.88	90.88	100	90.94	100	90.99	100	91.05	100	91.11	100	91.11	BPMPD & PU-CK	
		b. Peningkatan CB & Peran Aparatur Desa dlm Pengelolaan AMPL (Sanitasi)	90.69	90.69	100	90.90	100	90.97	100	91.01	100	91.05	100	91.05	BPMPD & PU-CK	
1.22.1.22.01.16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan															
	1. Kegiatan Fasilitas Kemahiran Swasta dan Usaha Mikro / Kecil dan Menengah di Perdesaan	a. Adanya Pengalokasian CSR Pihak Swasta thd Kelompok UKM di 5 Desa / Tahun	97.17	97.17	100	97.23	100	97.28	100	97.34	100	97.40	100	97.40	DISPERINDAG	
		b. Adanya Bantuan Modal dari Pihak Swasta thd Kelompok UKM di 5 Desa / Tahun	97.46	97.46	100	97.52	100	97.57	100	97.63	100	97.69	100	97.69	DISPERINDAG	
	2. Kegiatan Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Perekonomian di Bidang AMPL	a. Supervisi ke-5 Desa sebanyak 2X / Tahun (Air Minum)	97.75	97.75	10	97.81	20	97.86	20	97.92	20	97.98	20	97.98	BPMPD & PU-CK	
		b. Supervisi ke-5 Desa sebanyak 2X / Tahun (Sanitasi)	91.09	91.09	10	91.13	20	91.17	20	91.21	20	91.25	20	91.25	BPMPD & PU-CK	
		c. Pertemuan, Evaluasi & Apresiasi thd Pengurus BPSPAM TK / Tahun	98.54	98.54	20	98.10	40	98.15	60	98.21	80	98.27	80	98.27	BAFFEDA	
		d. Penambahan Modal BPSPAM sebagai BUMDes	98.33	98.33	100	98.39	200	98.44	300	98.50	300	98.56	300	98.56	DISPERINDAG-KOP	

KODE	PROGRAM/KEGATAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR	SRPD PENANGGUNG JAWAB	REK.
				2015		2016		2017		2018		2019				
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1.22.1.22.01.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan															
	1. Kegiatan Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	a. Peningkatan CB / Pengetahuan untuk kelompok Perempuan agar dapat Berusaha	88,62	88,62	20	98,66	20	98,74	20	98,80	20	99,30	20	99,30	DPKAB	
		b. Peningkatan CB / Pengetahuan untuk kelompok Perempuan agar dapat Berusaha (Santasi)	91,29	91,29	20	91,33	20	91,37	20	91,41	20	91,45	20	91,45	DPKAB	
JUMLAH ANGGARAN SUB UNIT IV						880		980		1.110		1.110		1.150		5.190
TOTAL RENCANA INVESTASI														295.505		

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

6.1 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan & Evaluasi diperlukan untuk memastikan Capaian yg ingin dicapai sesuai target. Ada 3 Format yg diberikan dalam melakukan Pemantauan & Evaluasi Dokumen RAD-AMPL, yaitu :

- 1). Format Pemantauan & Evaluasi RAD-AMPL (Form. 6.1)
- 2). Format Identifikasi Permasalahan & Rencana Tindak Lanjut (Form. 6.2)
- 3). Format Pendataan Integrasi Program & Kegiatan RAD AMPL
Dalam APBD (Form. 6.3)

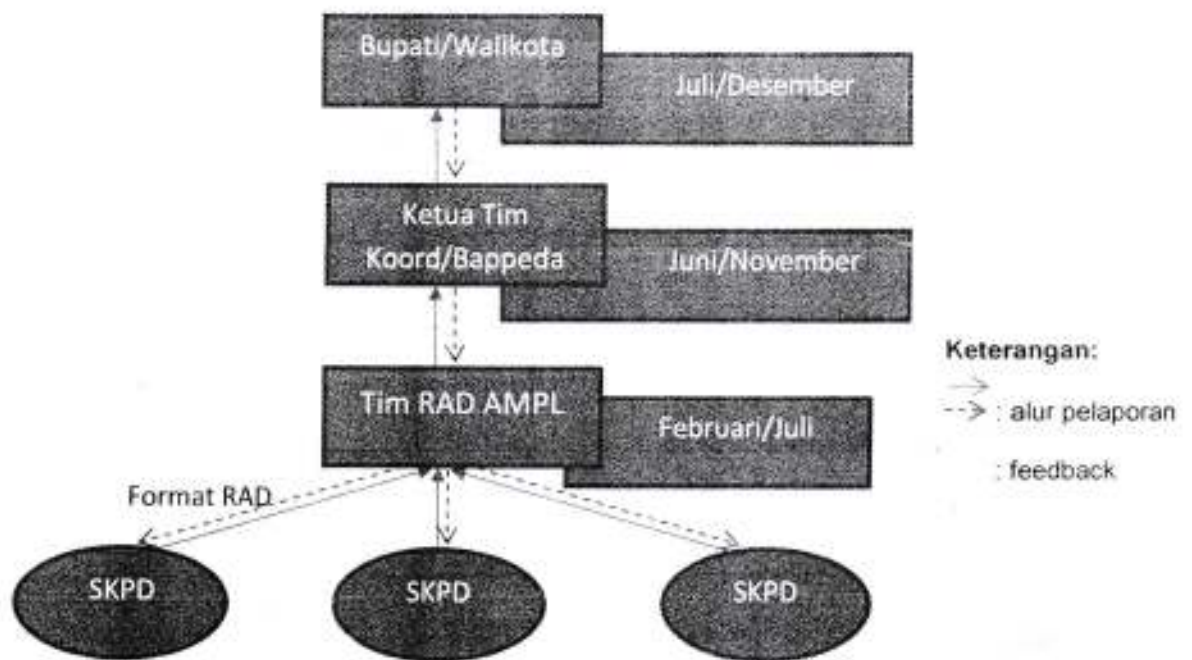
Adapun Mekanisme Pemantauan & Evaluasi Dokumen RAD-AMPL dilakukan sebagai berikut :

- 1). Kepala SKPD Kabupaten melakukan Pemantauan dan Evaluasi program/kegiatan RAD AMPL yang menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing.
- 2). Kepala SKPD melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL (Pokja RAD AMPL) menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda selaku Ketua TKK.
- 3). Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL atas Kinerja Pembangunan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Daerah.
- 4). Tim Teknis Penyusun RAD AMPL Menghimpun dan Menganalisis Laporan seluruh SKPD Pelaksana RAD AMPL serta masyarakat, dan Melaporkannya kepada Kepala Bappeda.
- 5). Kepala Bappeda Kabupaten melakukan Evaluasi terhadap Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi yang telah diolah Tim Teknis Penyusun RAD AMPL.
- 6). Dalam hal Evaluasi dari Hasil Pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian / penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan Rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.

- 7). Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappeda;
- 8). Kepala Bappeda melaporkan Hasil Pemantauan dan Evaluasi kepada Bupati.

Pemantauan dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 Tahun, yaitu : Di Bulan Juli dan Desember. Perhatikan Diagram dibawah ini :

Mekanisme Pelaporan Monev RAD-AMPL



SKPD Melaporkan pelaksanaan program/kegiatan RAD AMPL sesuai tupoksinya

BAB VII

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Pemerintah Kabupaten Sambas melalui Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Sambas telah menyusun Dokumen Rencana Aksi Daerah AMPL (RAD AMPL) Kabupaten Sambas Tahun 2015-2019 dengan Visi Pembangunan AMPL Kabupaten Sambas **“Terwujudnya Layanan AMPL Kabupaten Sambas yang Berkualitas Tahun 2019”**.

Untuk merealisasikan Visi Pembangunan AMPL Kabupaten Sambas tersebut, maka disusunlah rumusan Misi sebagai berikut: **“Mewujudkan Ketersediaan Air Minum yang Berkualitas dan Berkelanjutan, Menciptakan Lingkungan Permukiman yang Bersih dan Sehat bagi Masyarakat, Mewujudkan Peran serta Aktif Masyarakat dan Kepedulian Dunia Usaha/Swasta dalam Pembangunan AMPL, Menciptakan Sinkronisasi dan Sinergisitas Pembangunan AMPL serta Mewujudkan Pengelolaan dan Kelembagaan Pembangunan AMPL”**.

Keberhasilan pelaksanaan Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Sambas ditentukan oleh dukungan dan kepedulian yang kuat dari seluruh SKPD dan Stakeholder terkait. Target dari tujuan dan sasaran kinerja Pembangunan AMPL ini, setiap tahun akan diukur tingkat capaiannya melalui evaluasi kinerja. Hasil evaluasi kinerja ini kemudian dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan untuk melanjutkan dan melakukan perbaikan suatu kebijakan dan program pembangunan AMPL.

7.2. Rekomendasi

Dokumen RAD-AMPL Kabupaten Sambas 2015 – 2019 harus menjadi acuan dari Rencana Pembangunan di Bidang AMPL selama 5 (lima) tahun kedepan dan dapat di evaluasi kembali menurut kebutuhan. RAD AMPL Kabupaten Sambas harus mempunyai status hukum agar dapat menjadi acuan dan arahan dalam proses pembangunannya. Guna memperkuat posisi tawar, Dokumen RAD AMPL harus mendapatkan legitimasi oleh karena itu, perlu ditetapkan, setidaknya dalam bentuk Peraturan Bupati.

**MATRIKS RAD AMPL KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2015-2019**

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET PENCAPAIAN					ALOKASI ANGGARAN (Rp. 000.000,-)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah													
1. Fasilitas Pembangunan Sektor Air Minum dan Kesehatan Lingkungan													
	a. Terintegrasinya program-program dalam RAD AMPL pada Masyarakat (Air Minum)	59,25	59,38	59,36	59,41	59,47	20	20	20	20	20	APBD Kab	BAPPEDA
	b. Terintegrasinya program-program dalam RAD AMPL pada Masyarakat (Sanitasi)	83,21	83,24	83,28	83,31	83,35	20	20	20	20	20	APBD Kab	BAPPEDA
	c. Penambahan CB bagi Pengurus BPSPAM dalam Upaya Membangun BPSPAM menjadi BUMDes (Air Minum)	59,53	59,58	59,64	59,69	59,75	20	20	20	20	20	APBD Kab	BPMPTD
	d. Adanya sumber-sumber Air Bersih Baru yang Sehat bagi Masyarakat tanpa Merusak Keseimbangan Lingkungan sebagai Daerah Perahu Air		59,81		59,86			30		30		APBD Kab	BLM
	e. Adanya Model Plan Pemangan Air Limbah Kab. Sambas		83,38	83,42				150	150			APBD Kab	BAPPEDA
2. Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah													
	a. Peningkatan Pelayanan serta Jumlah Pelanggan PDAM	69,92	69,95	69,99	69,92	69,96	1.000	1.100	750	750	900	APBN/APBD	PRAM
	b. Meningkatnya pelayanan Air Minum di Daerah Perdesaan / Non PDAM	60,51	60,17	60,23	60,28	60,34	1.000	1.100	750	750	900	APBN/APBD	POKRE
3. Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Non Perpipaan													
	a. Perluasan Layanan Air Bersih untuk Daerah yang sudah memiliki Jaringan Perpipaan Berbasis Masyarakat	60,40	60,46	60,52	60,58	60,64	700	800	800	1.000	1.000	APBN/APBD	POKRE
	b. Penyediaan Air Bersih di Perdesaan	60,70	60,76	60,82	60,88	60,94	500	500	500	500	500	APBN/APBD	POKRE
	c. Penyediaan Air Bersih di Perdesaan	61,08	61,06	61,12	61,18	61,24	500	500	500	500	500	APBN/APBD	BPMPTD

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET PENCAPAIAN					ALOKASI ANGGARAN (Rp. 100.000,-)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Perencanaan Air Bersih												
	a. Efisiensi Fungsi & Isi Dek. RAD AMPL (Air Minum)	61,30	61,36	61,42	61,48	61,54	50	50	50	50	50	APBD KAB	RAPIKSA
	b. Evaluasi Fungsi & Isi Dek. RAD AMPL (Sambutan)	63,45	63,49	63,52	63,56	63,59	50	50	50	50	50	APBD KAB	RAPIKSA
	c. Konsultasi Publik Keuangan & Pengembangan PDAM		61,60			61,66		50			50	APBD KAB	PDAM
	d. Penggunaan TTG diin PAB di APBDes	61,72	61,78	61,84	61,90	61,96	50	50	50	50	50	APBD KAB	BPMPD
	e. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat diin Persehatan Lingkungan (sanitasi)	63,63	63,66	63,70	63,73	63,76	50	50	50	50	50	APUD KAB	UPKIPD
5	Pembangunan Jaringan Perpipaan Air Minum Daerah Perbatasan												
	a. Peningkatan Pelayanan Air Minum di Kec. Galing, Tekarang, Selangkung, Sapul & Silih	62,62	62,68	62,74	62,80	62,86	200	200	200	200	200	APBD KAB	PDCK
6	Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum												
7	Pengembangan Teknologi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah												
	a. Penggunaan Teknologi Tepat Guna diin PAB	62,32	62,38	62,44	62,50	62,56	50	50	50	50	50	APBD KAB	BPMPD
	b. Bantuan TTG di Desa	62,62	62,68	62,74	62,80	62,86	750	750	1.000	1.000	1.500	APBN/APBU	PDCK
	c. Tersedianya IPAL Sederhana oleh URM	63,00	63,05	63,09	63,13	63,17	50	50	50	50	50	APBD KAB	PDCK
	d. Adanya IPAL yg sesuai utk Industri	64,01	64,05	64,09	64,13	64,17	100	100	100	100	100	APBD PDUP	PDCK
	e. Adanya IPAL yg sesuai utk Permukiman / Perumahan	64,21	64,25	64,29	64,33	64,37	100	100	100	100	100	APDN	BPMPD
8	Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Limbah												
	a. Pengembangan Air Minum di Sambas, Sekeloa, Sekura, Tebak, Sempurik & Pemangkat	62,92	62,98	63,04	63,10	63,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	APBN/PDAP-BS-3/APBD	PDAM
	b. Adanya Sanitasi yang Sehat di Setiap Kantor Unit SKPD	64,40	64,44	64,47	64,51	64,54	250	250	250	250	250	APBN / APBN	PDCK
	c. Adanya Sanitasi yang Sehat di Setiap Puskesmas / RS	64,50	64,54	64,58	64,60	64,72	250	250	250	250	250	APBN / APBN	PDCK
	d. Adanya Sanitasi yang Sehat di Lokasi Permukiman	64,75	64,79	64,82	64,86	64,89	500	500	500	500	500	APBN / APBN	PDCK

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET PENCAPAIAN					ALOKASI ANGGARAN (Rp. 000.000,-)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Sharing Pendanaan Dana Pemeliharaan												
	a. Dana BLM untuk 1 - 2 Desa	63,22	63,28	63,34	63,40	63,46	220	220	440	440	440	APBD KAB	PDAM
	b. Tersedianya Dana Operasional Satker PIP & Pokja AMPL Kabupaten	63,52	63,58	63,64	63,70	63,76	110	110	110	110	110	APBD KAB	BAPPEDA
10	Pengembangan NSPK Bidang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)												
	a. NSPK Bidang Usaha Air Isi Ulang		63,82					25				APBD KAB	DEPERINDAG
	b. NSPK Bidang Usaha Air Isi Ulang		63,88					25				APBD KAB	BLU
	c. NSPK Bidang Usaha Air Isi Ulang		63,94					25				APBD KAB	INDUKS
11	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum, Air Limbah, Persempitan dan Drainase pada Lokasi Paica Rencana												
	a. Tersedianya Air Bersih yg cukup utk Korban Bencana	64,00	64,06	64,12	64,18	64,24	500	500	500	500	500	APBN/PAJAK Ke-1/APBD	DPD
12	Pembuatan Intake & IPA dan Pemasangan Pipa Transmisi												
	a. Peningkatan Pelayanan PDAM di Kec. Galing	64,30	64,36	64,42	64,48	64,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	APBN/APBD	PDAM
	b. Peningkatan Pelayanan PDAM di Kec. Jawi	64,60	64,66	64,72	64,78	64,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	APBN/APBD	PDAM
	c. Peningkatan Pelayanan PDAM di Kec. Sejangkung	64,90	64,96	65,02	65,08	65,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	APBN/APBD	PDAM
	d. Peningkatan Pelayanan PDAM di Kec. Subak	65,20	65,26	65,32	65,38	65,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	APBN/APBD	PDAM
	e. Peningkatan Pelayanan PDAM di Kec. Paloh	65,70	65,76	65,82	65,88	65,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	APBN/APBD	PDAM
	f. Peningkatan Pelayanan PDAM di Kec. Tekarang	65,88	65,86	65,92	65,98	66,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	APBN/APBD	PDAM
13	Penyediaan Prasarana Air Minum Sumber Riam Cagar dan Mernap												
	a. Peningkatan Pelayanan Air Minum di Kec. Sajingan Besar & Paloh		66,10		66,18			1.000		1.000		APBN/APBD PROJ	PDAM
14	Optimalisasi Percepatan Pelayanan Sumber Sungai Semelagi Hulu												
	a. Pengembangan Air Minum di Kec. Selakau Tua	66,22	66,28	66,34	66,40	66,46	500	500	500	500	500	APBN/APBD	PDAM

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET PENCAPAIAN					ALOKASI ANGGARAN (Rp. 000.000,-)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	
		2013	2016	2017	2018	2019	2013	2016	2017	2018	2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan														
1 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan														
	a.	Peningkatan Pelayanan Air Bersih di Tebas	66,52	66,38	66,64	66,70	66,76	150	150	150	150	150	APBD	PKCK
	b.	Peningkatan Pelayanan Air Bersih di Sajingan Besar	66,82	66,88	66,94	67,00	67,06	150	150	150	150	150	APBD	PKCK
	c.	Peningkatan Pelayanan Air Bersih di Jawai Selatan	67,12	67,18	67,24	67,30	67,36	150	150	150	150	150	APBD	PKCK
	d.	Peningkatan Pelayanan Air Bersih di Salonga	67,42	67,48	67,54	67,60	67,66	150	150	150	150	150	APBD	PKCK
	e.	Peningkatan Pelayanan Air Bersih di Sebak Timur	67,72	67,78	67,84	67,90	67,96	150	150	150	150	150	APBD	PKCK
2 Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan SPAM														
	a.	PJM Pro Aksi di 184 Desa	68,02	68,08	68,14	68,20	68,26	25	25	25	25	25	APRO KAB	PKCK
	b.	Peningkatan CB Aparatur Desa sebagai Pembiaya BUMDes	68,32	68,38	68,44	68,50	68,56	15	15	15	15	15	APRO KAB	PKCK
	c.	Desa mampu membuat IAB Air Bersih	68,62	68,68	68,74	68,80	68,86	25	25	25	25	25	APRO KAB	PKCK
3 Pengadaan Penyulingan Air Bersih														
	a.	Peningkatan Pelayanan Air Bersih di Kec. Pemangkat	69,92	69,98	70,04	70,10	70,16	400	400	250	250	400	APBN	PKCK
	b.	Peningkatan Pelayanan Air Bersih di Kec. Selkiau	69,22	69,28	69,34	69,40	69,46	400	400	250	250	400	APBN	PKCK
	c.	Peningkatan Pelayanan Air Bersih di Kec. Salonga	69,52	69,58	69,64	69,70	69,76	400	400	250	250	400	APBN	PKCK
	d.	Peningkatan Pelayanan Air Bersih di Kec. Tekarang	69,82	69,88	69,94	70,00	70,06	400	400	250	250	400	APBN	PKCK
	e.	Peningkatan Pelayanan Air Bersih di Kec. Sejangkong	70,12	70,18	70,24	70,30	70,36	400	400	250	250	400	APBN	PKCK
	f.	Peningkatan Pelayanan Air Bersih di Kec. Semparak	70,42	70,48	70,54	70,60	70,66	400	400	250	250	400	APBN	PKCK
	g.	Peningkatan Pelayanan Air Bersih di Kec. Sabab	70,72	70,78	70,84	70,90	70,96	400	400	250	250	400	APBN	PKCK
	h.	Peningkatan Pelayanan Air Bersih di Kec. Sajad	71,02	71,08	71,14	71,20	71,26	400	400	250	250	400	APBN	PKCK
	i.	Peningkatan Pelayanan Air Bersih di Kec. Galang	71,32	71,38	71,44	71,50	71,56	400	400	250	250	400	APBN	PKCK
	j.	Peningkatan Pelayanan Air Bersih di Kec. Paloh	71,62	71,68	71,74	71,80	71,86	400	400	250	250	400	APBN	PKCK

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET PENCAPAIAN					ALOKASI ANGGARAN (Rp. 000.000,-)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
4 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih														
a.	Peningkatan Pelayanan Air Bersih di Jawa Selatan	71,92	71,98	72,04	72,10	72,16	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500	APBN/Phak RE-3/APMD	PDCK	
b.	Peningkatan Pelayanan Air Bersih di Takarung	72,22	72,28	72,34	72,40	72,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	APBN/Phak RE-3/APMD	PDCK	
c.	Peningkatan Pelayanan Air Bersih di Toluk Keramat	72,52	72,58	72,64	72,70	72,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	APBN/Phak RE-3/APMD	PDCK	
d.	Peningkatan Pelayanan Air Bersih di Tangaran	72,82	72,88	72,94	73,00	73,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	APBN/Phak RE-3/APMD	PDCK	
e.	Peningkatan Pelayanan Air Bersih di Paloh	73,12	73,18	73,24	73,30	73,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	APBN/Phak RE-3/APMD	PDCK	
f.	Peningkatan Pelayanan Air Bersih di Sejanglang	73,42	73,48	73,54	73,60	73,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	APBN/Phak RE-3/APMD	PDCK	
g.	Peningkatan Pelayanan Air Bersih di Sapat	73,72	73,78	73,84	73,90	73,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	APBN/Phak RE-3/APMD	PDCK	
Program Lingkungan Sehat Perumahan														
1 Pengembangan Air Minum di Kota Sambas														
a.	Peningkatan Pelayanan PDAM di Kota Sambas	74,02	74,08	74,14	74,20	74,26	400	500	300	350	400	Phak Ke-3	PDAM	
2 Pemb. IPA & Pemasangan Pipa Transmisi, Distribusi														
a.	Peningkatan Pelayanan PDAM di Kota Sokora	74,32	74,38	74,44	74,50	74,56	400	500	300	350	400	Phak Ke-3	PDAM	
b.	Peningkatan Pelayanan PDAM di Kota Tatas	74,62	74,68	74,74	74,80	74,86	400	500	300	350	400	Phak Ke-3	PDAM	
c.	Peningkatan Pelayanan PDAM di Kota Semparak	74,92	74,98	75,04	75,10	75,16	400	500	300	350	400	Phak Ke-3	PDAM	
d.	Peningkatan Pelayanan PDAM di Kota Pemangkat	75,22	75,28	75,34	75,40	75,46	400	500	300	350	400	Phak Ke-3	PDAM	
e.	Peningkatan Pelayanan PDAM di Kota Selakau	75,52	75,58	75,64	75,70	75,76	400	500	300	350	400	Phak Ke-3	PDAM	
f.	Tersedianya Drainase yg baik di Kecamatan	84,93	84,96	85,00	85,03	85,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	APBN/APBN	PDCK	
g.	Adanya Sarana MCK yg Pengelolannya Berbasis Masyarakat	85,30	85,34	85,37	85,41	85,44	500	500	500	500	500	APBN/APBN	PDCK	
h.	Adanya Sarana MCK +++ yg Pengelolannya Berbasis Masyarakat		85,27	85,31	85,34	85,38		500	500	500	500	APBN	PDCK	
i.	Adanya IPAL di Lokasi Pendidikan		85,41	85,45	85,48	85,52		500	500	500	500	APRD/APRN	PDCK	
j.	Adanya IPAL di Lokasi Kesehatan	85,55	85,59	85,62	85,66	85,69	500	500	500	500	500	APRD/APRN	PDCK	
k.	Adanya IPAL di Lokasi Pertambangan	85,73	85,76	85,80	85,83	85,87	500	500	500	500	500	APRD/APRN	PDCK	
l.	Adanya IPT di Perumahan yg Berbasis Masyarakat		85,90	85,94	85,97	86,01		1.000	1.000	1.000	1.000	APBN	PDCK	

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET PENCAPAIAN					ALOKASI ANGGARAN (Rp. 000.000,-)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3 Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin.													
	a. Terciptanya Lingkungan Perumahan Perdesaan yang memiliki Air Minum yg Sehat	85,17	85,19	85,25	85,31	85,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	APBN/Tidak KE-2/APBD	PUKJ
	b. Adanya IPAL di Perumahan Masyarakat Pinggiran Badas Air	86,04	86,08	86,11	86,15	86,18	750	750	750	750	750	APBD KAB/APBD	PUKJ
	c. Adanya IPAL di Perumahan yg Berhamb Masyarakat	86,22	86,25	86,29	86,32	86,35	500	500	1.000	1.000	1.000	APBN	PUKJ
	d. Adanya jamban yg Sehat untuk MBR.	86,39	86,43	86,46	86,50	86,53	250	250	250	250	250	APBD KAB	PUKJ
4 Optimalisasi Percepatan Pelayanan Daerah Kawasan Industri Semparak (KIS) Sumber Sungai Sebangkai													
	a. Pengembangan Air Minum di Kec. Salatiga	85,43	85,49	85,55	85,61	85,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	APBN/APBD	PDAM
5 Optimalisasi Percepatan Pelayanan Sumber Danau Sebang													
	a. Pengembangan Air Minum di Kec. Sehaw	85,73	85,79	85,85	85,91	85,97	500	500	500	500	500	APBN/APBD	PDAM
6 Peningkatan Kualitas Air													
	a. Adanya Data Kualitas Sumber Air Baku di 18 Kecamatan	86,03		86,09		86,15	90	0	90	0	90	APBD KAB	REFRES
	b. Adanya Data Kualitas Air Limbah	86,57	86,60	86,64	86,67	86,71	20	20	20	20	20	APBD KAB	BLH
	c. Adanya Pengawasan terhadap Air Limbah Industri	86,74	86,78	86,81	86,85	86,88	30	50	75	100	100	APBD KAB	BLH
7 Sosialisasi Kebijakan Air Bersih & Sanitasi Dasar													
	a. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat tentang Air Minum & Pnyehatan Lingkungan (Air Minum)	86,21	86,27	86,33	86,39	86,45	30	40	50	40	30	APBD KAB	PUKJ
	b. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat tentang Air Minum & Pnyehatan Lingkungan (Sanitasi)	86,92	86,95	86,99	87,02	87,06	30	40	50	40	30	APBD KAB	PUKJ
8 Aksesibilitas Sumber Air Bersih dan Sanitasi Dasar													
	a. Adanya Kran Air untuk Sumber Air Pemadam Kebakaran	86,51	86,57	86,63	86,69	86,75	100	200	200	200	200	APBD KAB	PUKJ
	b. Tersedianya Air Minum sebagai Antisipasi Minum Kemarau	86,81	86,87	86,93	86,99	87,05	500	500	500	500	500	APBN/APBD/KA	PUKJ
	c. Adanya Alat Angkut Tinja dari Rumah ke IPLT		87,09	87,13	87,16	87,20		200	200	200	200	APBD KAB	PUKJ
	d. Adanya Tempat Pembuangan Sampah dari Rumah sbm dibawa ke TPA	87,23	87,27	87,30	87,34	87,37	500	500	500	500	500	APBD/APBN	PUKJ
	e. Adanya Sarana CTPS di Pasar, GOR, dll	87,41	87,44	87,48	87,51	87,55	200	300	300	300	300	APBD	PUKJ
	f. Adanya Sarana CTPS di Puskesmas, Prorandu, Poskesdes dll	87,50	87,62	87,65	87,69	87,72	200	100	300	300	300	APBD	PUKJ

PROGRAM/KEGATAN	INDIKATOR	TARGET PENCAPAIAN					ALOKASI ANGGARAN Rp. 000.000,-					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa													
1	Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan SPAM												
	a. PIM Pro Aksi di 104 Desa	87,11	87,17	87,23	87,29	87,35	25	25	50	50	50	APBD KAB	BPMFD
	b. Peningkatan CB Aparatur Desa sebagai Pembina BUMDes	87,41	87,47	87,53	87,59	87,65	15	15	15	15	15	APBD KAB	BPMFD
	c. Desa mampu membuat RAB Air Bersih	87,71	87,77	87,83	87,89	87,95	25	25	25	25	25	APBD KAB	BPMFD
2	Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Pemilihan Teknologi Air Minum												
	a. Desa Mampu Merencanakan PAB Desa sesuai Sumber Air Baku yang ada	88,01	88,07	88,13	88,19	88,25	50	50	50	50	50	APBD KAB	PKCK
	b. Aparatur Desa mampu menjadi Pembina Pemilihan Teknologi Air Minum di Desa	88,31	88,37	88,43	88,49	88,55	50	50	50	50	50	APBD KAB	BPMFD
3	Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Air Minum Desa												
	a. Adanya Partisipasi APBD dalam Sanitasi	88,61	88,67	88,73	88,79	88,85	200	200	200	200	200	APBD KAB	PKCK
	b. Adanya Partisipasi APBD dalam STBM	88,91	88,97	89,03	89,09	89,15	200	200	200	200	200	APBD KAB	BPMFD
4	Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa (Bidang Air Minum dan Sanitasi)												
	a. Peningkatan CB Pengurus BPSPAM	89,21	89,27	89,33	89,39	89,45	30	40	50	40	30	APBD KAB	BPMFD
	b. Peningkatan CB bagi Pengurus LPM & BPD dim Bidang Sanitasi & Persejahteraan Lingkungan	89,76	89,79	89,81	89,84	89,86	50	50	50	50	50	APBD KAB	BPMFD
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi													
1	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi (Air Minum dan Sanitasi)												
	a. Adanya Dokumen yang Baik & Lengkap tentang Pengembangan Air Terjun Riam Cagat sebagai Sumber Air Baku (Air Minum)	89,51	89,57	89,63	89,69	89,75	30	30	30	30	30	APBD KAB	BAPPEIDA
	b. Adanya Dokumen yang Baik & Lengkap tentang Pengembangan Air Terjun Riam Cagat sebagai Sumber Air Baku (Sanitasi)	89,83	89,87	89,90	89,94	89,97	20	20	20	20	20	APBD KAB	BAPPEIDA
	c. Ekipose Pengembangan PDAM untuk PMA / PMDN	89,80	89,85	89,90	89,95	90,00	30	30	30	30	30	APBD KAB	BAPPEIDA
	d. Adanya Peningkatan Jumlah PMA / PMDN dalam Bidang Air Minum	90,05	90,10	90,15	90,20	90,25	30	30	30	30	30	APBD KAB	Keban Penggunaan Peralatan Baru
	e. Adanya Dokumen yang Baik & Lengkap tentang Pengembangan IPTT sebagai BUMD	89,31	89,34	89,38	89,41	89,45	30	30	30	30	30	APBD KAB	BAPPEIDA
	f. Adanya Dokumen yang Baik & Lengkap tentang Pengembangan TPA terpadu sebagai BUMD	89,20	89,22	89,25	89,29	89,32	30	30	30	30	30	APBD KAB	BAPPEIDA

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET PENCAPAIAN					ALOKASI ANGGARAN (Rp. 100.000,-)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Fasilitasi & Koordinasi Kerjasama CSR di Bidang Air Minum dan Sanitasi													
	a.	Adanya Dana CSR untuk Bidang Air Minum	90,30	90,35	90,40	90,45	90,50	30	30	30	30	30	PIKAR K0-1	BAFIDEKA
	b.	Adanya Dana CSR untuk kampanye Bidang Air Minum	90,55	90,60	90,65	90,70	90,75	30	30	30	30	30	APRO KAR/PU	DIKRAF
	c.	Adanya Dana CSR untuk Pengelolaan Limbah	88,46	88,49	88,53	88,56	88,60	50	50	50	50	50		BLH
	d.	Adanya Dana CSR untuk Penanganan Masalah Pemukiman	88,67	88,67	88,70	88,74	88,77	25	25	25	25	25		PIKAR
	Program Pendidikan Anak Usia Dini / Wajib Belajar 9 tahun / Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar Biasa													
1	Kegiatan Pembiayaan Sarana Air Bersih dan Sanitary													
	a.	PAB untuk 20 Sekolah Dasar per Tahun	90,80	90,85	90,90	90,95	91,00	500	500	500	500	500	APRN/APRD	DIKRAF
	b.	PAB untuk 10 Sekolah Menengah per Tahun	91,05	91,10	91,15	91,20	91,25	300	300	300	300	300	APRD	DIKRAF
	c.	PAB untuk 5 Sekolah Menengah Atas / SMK per Tahun	91,30	91,35	91,40	91,45	91,50	200	200	200	200	200	APRD	DIKRAF
	d.	PAB untuk SLB & Paket A-C	91,55	91,60	91,65	91,70	91,75	100	100	100	100	100	APRD KAR	DIKRAF
	e.	PAB untuk 5 PAUD / TK per tahun	91,80	91,85	91,90	91,95	92,00	100	100	100	100	100	APRD KAR	DIKRAF
	f.	Adanya WC / jamban yg sehat di Sekolah	88,81	88,84	88,88	88,91	88,95	200	200	200	200	200	APRD	DIKRAF
	g.	Adanya Sarana CTPS di Sekolah	88,98	89,02	89,05	89,09	89,12	100	100	100	100	100	APRD KAR	DIKRAF
2	Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary													
	a.	Peningkatan Pelayanan Air Minum utk Siswa	92,05	92,10	92,15	92,20	92,25	250	250	250	250	250	APRD	DIKRAF
	b.	Adanya Drainase yg baik di Sekolah	89,26	89,30	89,33	89,36	89,39	100	100	100	100	100	APRD KAR	DIKRAF
	c.	Adanya WC / jamban yg sehat di Sekolah	89,33	89,37	89,40	89,44	89,47	250	250	250	250	250		DIKRAF
	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai & Danau													
1	Kegiatan Rehabilitasi Kawasan Kritis Daerah Tangkapan Sungai dan Danau													
	a.	Penanaman 2.000 Baling Bakau per Tahun untuk 5 Kecamatan terdampak	92,30	92,35	92,40	92,45	92,50	180	180	180	180	180	APRD KAR	BLH
	b.	Pengembangan Pelayanan Untuk Masyarakat sebagai antispasik Mutiir Kemurus	92,55	92,60	92,65	92,70	92,75	180	180	180	180	180	APRD KAR	PIKAR
	c.	Terpeliharanya Terasai Sungai / Pant di bagian Daerah Hiliran Limbah	89,51	89,54	89,58	89,61	89,65	100	100	100	100	100	APRD KAR	SDA - PI
	d.	Pengembangan Pelayanan Untuk Masyarakat sebagai antispasik Mutiir Kemurus	89,69	89,73	89,77	89,81	89,85	100	100	100	100	100	APRD KAR	SDA - PI

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET PENCAPAIAN					ALOKASI ANGGARAN [Rp. 000.000,-]					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2. Kegiatan Rehabilitasi Kawasan Lindung dan Daerah Tangkapan Sungai dan Danau													
	a. Perlindungan Mata Air sbg Sumber Air Baku PDAM	92,80	92,85	92,90	92,95	93,00	100	100	100	100	100	APBD KAB	BLU
	b. Perlindungan Mata Air sbg Sumber Air Baku PDAM	93,05	93,10	93,15	93,20	93,24	100	100	100	100	100	APBD KAB	BLU
	c. Perlindungan Mata Air sbg Sumber Air Baku PDAM	93,25	93,34	93,39	93,44	93,49	100	100	100	100	100	APBD KAB	BLU
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air lainnya.													
1. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya.													
	a. Meningkatnya kesadaran Masyarakat tentang Air Minum yang Sehat	93,54	93,59	93,64	93,69	93,74	75	75	75	75	75	APBD KAB	BPMPD
	b. Peningkatan Kampanye tentang Air Minum yang Sehat	93,79	93,84	93,89	93,94	93,99	50	50	50	50	50	APBD KAB	BLU
2. Kegiatan Peningkatan Konservasi Air Tanah													
	a. Perlindungan terhadap Gunung Sesejuh sebagai Daerah Resapan Air	94,04	94,09	94,14	94,19	94,24	50	50	50	50	50	APBD KAB	PDAM
	b. Perlindungan terhadap Gunung Selindung sebagai Daerah Resapan Air	94,29	94,34	94,39	94,44	94,49	50	50	50	50	50	APBD KAB	PDAM
	c. Perlindungan terhadap Gunung Gajah sebagai Daerah Resapan Air	94,54	94,59	94,64	94,69	94,74	50	50	50	50	50	APBD KAB	PDAM
3. Inventarisasi Daerah Sumber-sumber Air Bersih													
	a. Penyediaan Database Daerah-Desah Sumber Air Baku	94,79	94,84	94,89	94,94	94,99	50	50	50	50	50	APBD KAB	DAKUNDA
4. Study Cakupan Penghijauan dan Sumber Mata Air													
	a. Terpilihannya Jumlah Air Tanah yg ada pada Sumber Mata Air yang ada	95,04	95,09	95,14	95,19	95,24	25	25	25	25	25	APBD KAB	BLU
5. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan, Irigasi, Bawa dan Jaringan Pengaliran Lainnya													
	a. Meningkatnya Pelayanan Irigasi untuk Peningkatan Hasil Pertanian	95,29	95,34	95,39	95,44	95,49	2000	2000	2000	2000	2000	APBN/APBD	SKPD
	b. Terlayannya Fungsi Daerah Bawa sbg Perahan Energi dan Muara yang baik	95,54	95,59	95,64	95,69	95,74	2000	2000	2000	2000	2000	APBN/APBD	SIA & Pengaliran - PP
6. Aksesibilitas Sumber Air Bersih dan Sanitasi Dasar													
	a. Adanya Sarana CTPS di Pasar, GOR, dll	96,09	96,13	96,17	96,21	96,25	200	300	300	300	300	APBD KAB	BPWKS
	b. Adanya Sarana CTPS di Puskesmas, Poyandu, Puskesmas dll	96,09	96,13	96,17	96,21	96,25	200	300	300	300	300	APBD KAB	BPWKS

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET PENCAPAIAN					ALOKASI ANGGARAN (Rp. 000.000,-)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan													
1	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan												
	a. Peningkatan Peran KMA yg ada terhadap Pelestarian Lingkungan	95,79	95,84	95,89	95,94	95,99	10	10	10	10	20	APBD KAB	BPMFD
	b. Meningkatkan Motivasi Masyarakat dim Pelestarian Lingkungan	96,04	96,09	96,14	96,19	96,24	10	10	10	10	20	APBD KAB	BPMFD
	c. Kampanye Stop BABS & PHBS oleh Kader Posyandu	90,29	90,33	90,37	90,41	90,45	50	50	50	50	50	Pihak ke 3	Diakoa
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat												
	a. Peningkatan Peran Tamas & Toga yg ada terhadap Pelestarian Lingkungan	96,30	96,36	96,41	96,47	96,53	50	50	50	50	50	APBD KAN	BLH
	b. Peningkatan Peran Aparatur Desa terhadap Pelestarian Lingkungan	96,59	96,65	96,70	96,76	96,82	50	50	50	50	50	APBD KAB	BPMFD
	c. Pelatihan Teknis Pengelolaan Air Limbah (sewa) SNI	90,49	90,53	90,57	90,61	90,65	50	50	50	50	50	APBD KAB	BLH
	d. Peningkatan CB bagi Kader Desa / Teknis dim Bidang Sanitasi & Kesehatan Lingkungan	90,64	90,73	90,77	90,81	90,85	50	50	50	50	50	APBD KAB	BPMFD
3	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Bidang AMPL												
	a. Peningkatan CR & Peran Aparatur Desa dim Pengelolaan AMPL (Air Minum)	96,08	96,94	96,99	97,05	97,11	100	100	100	100	100	APBD KAB	BPMFD & PDI LK
	b. Peningkatan CR & Peran Aparatur Desa dim Pengelolaan AMPL (Sanitasi)	90,09	90,93	90,97	91,01	91,05	100	100	100	100	100	APBD KAB	BPMFD & PDI LK
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan													
1	Kegiatan Fasilitas Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro / Kecil dan Menengah di Perdesaan												
	a. Adanya Pengalokasian CSR Pihak Swasta thd Kelompok UKM di 5 Desa / Tahun	97,17	97,23	97,28	97,34	97,40	100	100	100	100	100	APBD KAB	Disperindag
	b. Adanya Bantuan Modal dari Pihak Swasta thd Kelompok UKM di 5 Desa / Tahun	97,46	97,52	97,57	97,63	97,69	100	100	100	100	100	APBD KAB	Disperindag
2	Kegiatan Pembinaan, Pemantuan dan Evaluasi Perkeekonomian di Bidang AMPL												
	a. Supervisi ke-5 Desa sebanyak 2X / Tahun (Air Minum)	97,75	97,81	97,86	97,92	97,98	10	20	20	20	20	APBD KAB	BPMFD & PDI LK
	b. Supervisi ke-5 Desa sebanyak 2X / Tahun (Sanitasi)	91,04	91,13	91,17	91,21	91,25	10	20	20	20	20	APBD KAB	BPMFD & PDI LK
	c. Pertemuan, Evaluasi & Apresiasi thd Pengaruh RPSMAM 1X / Tahun	98,04	98,10	98,15	98,21	98,27	20	40	60	60	60	APBD KAB	BANSEDA
	d. Penambahan Modal BPSMAM sebagai BMDDes	98,11	98,24	98,44	98,50	98,56	100	200	300	300	300	APBD KAB	Disperindagkop

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET PENCAPAIAN					ALOKASI ANGGARAN [Rp. 000.000,-]					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan													
1 Kegiatan Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif													
	a. Peningkatan CB / Pengetahuan untuk kelompok Perempuan agar dapat Berusaha	98,62	98,60	98,74	98,80	98,30	20	20	20	20	20	APRO KAH	HPPAKB
	b. Peningkatan CB / Pengetahuan untuk kelompok Perempuan agar dapat Berusaha	91,29	91,33	91,37	91,41	91,45	20	20	20	20	20	APRO KAH	HPPAKB